



**POSISI PEREMPUAN BEKERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
DISKRIMINASI GENDER
(STUDI DESKRIPTIF POSISI PEREMPUAN YANG BEKERJA
DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

RATNA MUFIDAH

NIM 020910302074

Asal:	Hasil Pembelian	Kelas
Terima Tgl :	23 JUN 2006	305.3
No. Induk :		MUF P

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Ibunda Siti Fatimah dan Ayahanda A. Hilmi tercinta, yang telah mendoakan
dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;*

*Kedua kakakku, M. Fatkhur Rohman dan Laila Fatihatun tersayang, yang
telah memberikan motivasi dan keceriaan selama ini;*

Almamater Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Wanita diciptakan bukan dari tulang kepala laki-laki yaitu untuk disembah dan bukan pula diciptakan dari telapak kaki laki-laki yaitu untuk diinjak-injak dan direndahkan, melainkan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yaitu untuk sejajar dan mendampingi”. (Kahlil Gibran)¹

¹ Gibran, Kahlil. 1986. *Sang Nabi*. Jakarta: Pustaka Jaya.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Mufidah

NIM : 020910302074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "Posisi Perempuan Bekerja Serta Dampaknya Terhadap Diskriminasi Gender (Studi Deskriptif Posisi Perempuan yang Bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2006

Yang menyatakan,



Ratna Mufidah

NIM. 020910302074

PENGESAHAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari : Sabtu

tanggal : 27 Mei 2006

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim penguji:

Ketua,



(Dra. Elly Suhartini, M.Si)

NIP. 131 472 793

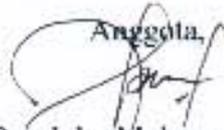
Sekretaris (Dosen pembimbing),



(Dra. Nur Dyah Gianawati MA)

NIP. 131 471 998

Anggota,



(Drs. Joko Mulyono, M.Si)

NIP. 131 907 179

(Drs. H. Sulomo, SU)

NIP. 130 879 635

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



(Dr. Ung N

W., M.S)

NIP. 130 674 836

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “ Posisi Perempuan Bekerja Serta Dampaknya Terhadap Diskriminasi Gender (Studi Deskriptif Posisi Perempuan yang Bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang)”. Karya tulis ini disusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ung Nasdia BS. W., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Ibu Dra. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Drs. Akhmad Ganefo, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Semua bapak dan ibu dosen yang tidak hanya telah membagi ilmu selama berada di Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Para staf administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terima kasih atas bantuannya;
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, 27 Mei 2006

Penulis

RINGKASAN

POSISI PEREMPUAN BEKERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DISKRIMINASI GENDER (STUDI DESKRIPTIF POSISI PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG), RATNA MUFIDAH, 020910302074, 2006, 104 hlm.

Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran gender antara perempuan dan laki-laki dimana kaum perempuan berada pada posisi dan kondisi yang tidak menguntungkan seperti perempuan identik dengan wilayah domestik dan laki-laki sebagai penguasa publik. Proses terjadinya perbedaan peran gender ini dilandasi oleh sosialisasi nilai-nilai budaya yang lebih banyak mendukung konsep agama yang memapankan ketimpangan peran sosial menurut jenis kelamin ini. Di lain sisi, perbedaan peran gender ini dalam perkembangannya telah dibakukan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tak berstruktur sehingga dalam pemaparan informasi oleh responden dapat lebih leluasa dan tidak kaku. Wawancara ini dilaksanakan terhadap sembilan responden perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Oleh karena peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur maka peneliti menerapkan metode wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi dan data yang lebih kaya dan lebih mendalam. Setelah menganalisis data maka langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data dengan metode triangulasi dimana peneliti menggali data dari karyawan laki-laki yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang guna mengklarifikasi data yang diperoleh dari responden perempuan sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai posisi perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Keikutsertaan kaum perempuan ke dalam wilayah publik bukanlah suatu jalan yang mudah melainkan suatu proses yang rumit karena adanya faktor-faktor yang

dapat menghambat aktualisasi peran perempuan dalam wilayah publik tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang masih merasa kebingungan dalam membagi waktu antara pekerjaan domestik dengan pekerjaan publik. Untuk meminimalisir kesulitan dalam membagi waktu antara kantor dan rumah, sebagian responden menyerahkan pekerjaan domestik mereka kepada pembantu dan pada sebagian responden lainnya lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan domestik bersama-sama dengan suami dan anak-anak. Kultur patriarki pun masih terlihat dalam pernyataan baik dari responden laki-laki maupun perempuan bahwa masuknya perempuan ke dalam wilayah publik hendaknya tidak melupakan peran kodrati perempuan. Dengan kata lain, pekerjaan publik isteri merupakan pekerjaan tambahan yang hanya berfungsi untuk menambah penghasilan suami. Hal ini berarti bahwa peran isteri yang bekerja adalah sebagai *secondary bread winner*, sedangkan peran suami adalah sebagai *the first bread winner*. Dalam aktualisasi peran dalam wilayah publik pun masih terlihat bahwa peran-peran yang dimainkan adalah masih berdasarkan atas stereotip pada masing-masing jenis kelamin. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perempuan masih mengalami subordinasi. Selain itu, dalam kegiatan Dharma Wanita yang dilaksanakan sebagai aktualisasi peran perempuan sebagai isteri yang baik (sebagai cerminan dari ideologi familialisme) masih mengandung unsur patriarki karena struktur organisasinya mengikuti struktur hirarki suami.

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa data dan pembahasan adalah bahwa kaum perempuan -dalam kapasitas intelektual dan mungkin stamina- bisa sama dengan pria dalam mengaktualisasikan kemampuan kariernya di dunia kerja karena perempuan juga mempunyai kapasitas *pour-soi* (rasionalitas maskulin) atau dorongan maskulin karena mempunyai pula sedikit hormon testosteron. Namun, ada tuntutan kodrati (kodrat feminin yang sangat kuat melekat) yang membuat kaum perempuan tidak mampu mengelakkannya sehingga ketika perempuan ingin lari dari kodrat ini, terjadilah krisis yang membawa suasana disharmoni, baik dalam dirinya, maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Suasana disharmoni tersebut bisa diikuti

dengan proses marginalisasi, subordinasi, maupun beban ganda terhadap perempuan. Namun demikian, dengan masuknya kaum perempuan ke dalam wilayah publik secara langsung dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan terhadap kaum laki-laki bahwa kaum perempuan juga memiliki potensi yang tidak kalah atau bahkan bisa lebih baik daripada kaum laki-laki.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Fokus Kajian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	11
1.6.2 Penentuan Informan.....	11
1.6.3 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.6.4.1 Observasi.....	13
1.6.4.2 Wawancara.....	14
1.6.4.3 Dokumentasi	14
1.6.5 Teknik Analisa Data	15

1.6.6	Keabsahan Data	17
1.6.7	Proses Penelitian.....	18
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1	Tinjauan Pustaka	20
2.1.1	Profil Perempuan Dan Gender.....	20
2.1.2	Kendala-kendala Perempuan Bekerja.....	38
2.1.3	Kesetaraan Gender: Sebuah Refleksi Emansipasi Perempuan	42
2.1.4	Feminisme: Sebuah Perspektif Perempuan	45
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	55
BAB III.	PEMBAHASAN.....	58
3.1	Deskripsi Daerah Penelitian.....	58
3.1.1	Lokasi Penelitian	58
3.1.2	Identitas Responden.....	59
3.1.3	Gambaran Umum Instansi	59
3.1.3.1	Bagian Umum	60
3.1.3.1.1	Sub Bagian Umum	60
3.1.3.1.2	Sub Bagian Keuangan	61
3.1.3.2	Bagian Persidangan.....	61
3.1.3.2.1	Sub Bagian Rapat Dan Risalah	61
3.1.3.2.2	Sub Bagian Informan Dan Perpustakaan.....	62
3.1.4	Pemerintahan Daerah.....	62
3.1.5	Penduduk Dan Tenaga Kerja.....	63
3.1.6	Kondisi Sosial Ekonomi	64
3.1.6.1	Keyakinan Penduduk	64

3.1.6.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	64
3.2	Hasil Penelitian.....	64
3.2.1	Percmpuan Di Sektor Privat	64
3.2.1.1.	Pembagian Kerja Domestik Antara Suami Dan Istri	68
3.2.1.2	Posisi Perempuan (Istri) Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga	73
3.2.2	Perempuan Di Sektor Publik	74
3.2.2.1	Posisi Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Tenaga Kerja Laki-laki Di Kantor	77
3.2.2.2	Jabatan Struktural, Pangkat Dan Gaji Yang Dimiliki Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Tenaga Kerja Laki-laki	78
3.2.2.3	Kegiatan Dharma Wanita.....	81
3.2.3	Aspirasi Dan Pandangan Laki-laki (Suami) Dan Perempuan (Istri) Tentang Perempuan Karier Pada Masa Sekarang	81
BAB IV.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Proses Analisis Data	16
1.2 Proses Keabsahan Data	18
3.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Jombang	90
B. Karakteristik Responden	91
C. Surat ijin penelitian dari Lembaga Penelitian (LEMLIT) Unversitas Jember	98
D. Surat ijin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang	99



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah telah mencatat bahwa kaum perempuan telah mengalami kenyataan pahit dari jaman dahulu hingga sekarang ini. Mereka dianggap sebagai kaum yang tidak berdaya, lemah, dan selalu menjadi yang “ke-2”. Berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil diterima oleh kaum perempuan. Selain itu, perempuan sebagai kaum minoritas masih mengalami subordinasi, marginalisasi, kekerasan, eksploitasi, dan lain-lain, baik secara fisik maupun psikis. Penderitaan dan ketidakadilan tersebut tidak lain merupakan ekscs dari ideologi gender yang bias, yang membedakan peran yang pantas antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini selanjutnya menciptakan pandangan *stereotype* yaitu gambaran dalam kepala kita yang merupakan generalisasi tentang sifat-sifat yang dimiliki seseorang tanpa didukung oleh fakta obyektif bagi perempuan dan laki-laki (Asy'ari, 1983), dimana stereotip tersebut seakan-akan telah terkunci mati dan tidak bisa diubah. Kemudian stereotip menghasilkan pelabelan terhadap dua jenis kelamin tersebut dan akibat pelabelan tersebut kaum perempuan berada pada posisi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Beberapa label yang diberikan pada perempuan misalnya lemah lembut, halus, emosional, irasional, sabar, bukan pencari nafkah, tergantung, dilindungi, dan lain-lain. Begitu sebaliknya pada laki-laki. Perbedaan stereotip ini kemudian membawa dampak terhadap pembagian kerja secara seksual dimana peran masing-masing gender adalah berbeda dan perbedaan tersebut adalah baku dan harus dijalankan oleh masing-masing gender. Apabila laki-laki ataupun perempuan keluar dari kotak stereotip tersebut maka mereka dianggap menyimpang.

Bagi semua masyarakat, sebutan lazim yang senama bagi gender adalah subordinasi perempuan, dan ketidakadilan (diskriminasi) gender membagi laki-laki bertindak sebagai bos dan perempuan sebagai sekretaris (bawahan laki-laki). Keduanya adalah sama dengan sebutan superior dan inferior, penguasa dan dikuasai, atasan dan bawahan, dan sebagainya yang menunjukkan hierarki kekuasaan lainnya.

Salah satu ideologi paling kuat yang mencerminkan perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan privat. Wilayah publik yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi laki-laki. Meskipun ada perempuan yang memasuki dan mungkin pada akhirnya memimpin pranata semacam itu, namun di mana-mana tidak ada perempuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dalam cara yang sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Akses perempuan terhadap kekuasaan senantiasa lebih kecil daripada laki-laki meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang sama. Karena perempuan tidak terwakili dengan semestinya dalam lingkup publik, mereka kurang mampu menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kesejahteraan gendernya. Ideologi publik dan privat cenderung mengandung makna bahwa lingkup pengaruh perempuan adalah rumah.

Sebenarnya perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki yang berproses melalui budaya dan melahirkan ideologi gender, tidak menjadi masalah apabila dasar pemikiran dan pandangan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan. Namun, dalam kenyataannya tidaklah demikian. Perbedaan gender ini telah menciptakan diskriminasi yang timpang, dengan pihak perempuan pada posisi yang dirugikan. Namun, tidak dapat dipungkiri sampai sekarang pun masih banyak perempuan yang belum menyadari bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanam sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja melainkan juga dialami oleh laki-laki. Namun, ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari diskriminasi gender adalah marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotip gender, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat peran perempuan dibatasi oleh kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan. Dengan

dibakukannya peran isteri sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengurus rumah tangga, berarti peran kaum perempuan yang resmi diakui adalah peran domestiknya. Meskipun demikian, bukan berarti perempuan tidak boleh berkecimpung dalam kegiatan di luar rumah tangganya. Perempuan bisa saja memilih suatu kegiatan yang memungkinkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan hendaknya mampu mengubah citra dirinya sebagai *konco wingking* atau istri yang semata-mata hanya melahirkan, memasak dan berhias, tetapi menjadi manusia seutuhnya (Toer dalam Munik'ah, 2005: 21). Sehingga tidak perlu lagi mempertahankan pandangan yang menyatakan perempuan adalah sosok yang lemah dan sebaliknya laki-laki sebagai sosok yang kuat dan dominan dalam segala bidang kehidupan. Perempuan dapat memasuki bidang dan tugas yang seharusnya untuk kaum laki-laki, yaitu dengan bekerja di luar rumah.

Peranan perempuan di masa sekarang sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodrat sebagai perempuan, yaitu sebagai isteri dan sebagai ibu saja. Namun telah berkembang sedemikian rupa sehingga perempuan mampu berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam GBHN 1993 tentang perempuan dalam pembangunan, sebagai berikut:

1. Perempuan dalam pembangunan berkembang selaras, serasi dan seimbang dengan peranan dalam keluarga dan masyarakat.
2. Peranan perempuan dalam pembangunan makin dimantapkan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
3. Peranan dan tanggung jawab perempuan dalam pembangunan tidak akan mengurangi perannya dalam pembangunan keluarga.

Adapun tipe-tipe perempuan menurut Budiman (1991: 19) sebagai berikut:

1. Perempuan yang bekerja.

Perempuan yang bekerja memberikan penghasilan dengan melakukan kegiatan di luar rumah tangganya. Perempuan yang bekerja mempunyai kesibukan yang lebih banyak, sehingga kemungkinan peranannya sebagai isteri dan pendidik kurang dapat dipenuhi.

2. Perempuan yang mandiri.

Perempuan yang menekankan pada kemandiriannya sebagai perempuan. Dia bekerja memberikan penghasilan uang dan diputuskannya sendiri penggunaannya. Dalam hal ini perawatan dan pendidikan anak serta pekerjaan rumah tangga diatur bersama suami berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan dua tipe perempuan di atas, maka tipe perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2006 ini merupakan gabungan dari tipe perempuan yang bekerja dan perempuan yang mandiri. Namun, sebagian besar responden menyiratkan tipe yang kedua, yaitu bekerja sama dengan suami dalam melaksanakan urusan keluarga dan rumah tangga. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pendapat beberapa informan bahwa mereka tidak mau terkekang gerakannya hanya di dalam rumah. Dengan kata lain, mereka menginginkan suatu rutinitas yang bisa dikerjakan di luar rumah yaitu dalam bentuk kerja pada suatu instansi atau lembaga pemerintahan. Meskipun demikian, mereka tidak lantas lepas tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Mereka baik para isteri maupun para suami bekerjasama dalam pembinaan keluarganya terutama perawatan dan pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu, ada pula sebagian kecil informan perempuan yang masih kesulitan dalam pembagian waktu antara bekerja di kantor dengan kewajiban yang harus dilaksanakan di rumah sehingga tidak jarang perannya sebagai ibu rumah tangga menjadi pilihan yang dikesampingkan setelah pekerjaan kantor serta perannya sebagai isteri dan pendidik menjadi kurang dapat terpenuhi.

Keadaan yang tersurat di atas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh perempuan bekerja atau perempuan karier yaitu masalah pembagian waktu. Adapun kendala-kendala lainnya yang dapat menghambat aktualisasi diri perempuan dalam sektor publik antara lain faktor struktural yang hierarkis (atasan-bawahan), faktor teologis, faktor kultural (budaya patriarki), dan faktor personal dari perempuan itu sendiri.

Pertama, faktor struktural yang menciptakan kondisi superordinan (sebagai penguasa atau atasan) dan kondisi subordinan (yang dikuasai atau bawahan).

Superordinan menggambarkan sebagai penguasa yang berhak atas segala-galanya terhadap bawahannya. Sedangkan pihak subordinan adalah pihak yang tereksploitasi oleh superordinannya sehingga tidak dapat mewujudkan hak-haknya yang hanya terbentur oleh hegemoni yang telah ditancapkan ke dalam pola pikir mereka. Kemudian keadaan struktural melahirkan pola kekuasaan patriarkhi yang terinternalisasi dalam budaya patriarkhi. Di dalam pola kekuasaan patriarkhi berlangsung kecenderungan dominasi terhadap kelompok minoritas (perempuan). Sehingga, dalam sistem matriarkhi pun, di ruang publik umumnya yang muncul tetap struktur kekuasaan patriarkhi. Konstruksi sosial yang berasal dari kekuasaan patriarkhi mengakibatkan struktur sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Faktor selanjutnya yaitu faktor agama. Adanya penafsiran yang salah terhadap ajaran-ajaran agama misalnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti pada surat An-Nisa' (34) menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan (Wiludjeng *et al*, 2005). Ayat ini sekaligus memberikan penegasan mengenai posisi laki-laki sebagai pihak yang "berada di depan" untuk melindungi perempuan. Bahkan ayat ini pun kemudian merupakan penegasan bahwa pemimpin itu adalah laki-laki, seperti tercermin pada imam sholat dan praktik penyelenggaraan negara yang dalam kenyataannya dilakukan oleh laki-laki. Sebagai akibatnya, perempuan tidak memperoleh tempat yang sebanding dengan yang diperoleh laki-laki sebagai pemimpin strategis.

Yang terakhir yaitu faktor personal yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan apakah perempuan masih tetap bersedia tertindas oleh laki-laki atau melakukan langkah baru dengan cara merombak struktur dan budaya yang menjadi penyebab ketimpangan posisi antara perempuan dan laki-laki sehingga menghasilkan suatu kondisi yang seimbang antara keduanya. Namun, dalam kenyataannya tidaklah mudah melakukan hal seperti itu melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagai contoh faktor personal yang ada dalam diri perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yaitu faktor pendidikan. Oleh karena itu makin terbukanya peluang kerja bagi perempuan,

menimbulkan gagasan untuk meningkatkan potensi perempuan dalam bersaing di sektor publik misalnya dalam hal pendidikan. Dengan fenomena yang demikian maka kaum perempuan perlu dididik agar memiliki kemampuan yang setara atau bahkan melebihi kaum laki-laki. Apalagi bagi perempuan yang memilih untuk berkarier atau bekerja pada instansi-instansi pemerintah atau swasta yang lebih memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, faktor pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja adalah faktor-faktor yang perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja untuk bisa mendapatkan posisi yang diinginkan. Semakin tinggi pendidikan, keahlian serta pengalaman kerja seseorang maka semakin besar pula peluang yang dapat dimasuki seseorang dalam suatu promosi jabatan atau pekerjaan.

Dengan makin meningkatnya isteri yang berperan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, ternyata memunculkan pandangan yang positif dimana masyarakat yang modern memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak asing lagi. Banyak kondisi yang mendorong para isteri untuk meninggalkan tempatnya yang biasa dan kemudian melakukan sesuatu yang berguna demi memperbaiki sekaligus meningkatkan keadaan hidupnya serta keluarganya.

Keadaan dimana perempuan (isteri) yang bekerja di luar rumah ini nampaknya sudah menjadi sesuatu yang umum. Isteri tidak hanya berperan di dalam rumah saja, artinya perempuan tidak lagi semata-mata dituntut untuk mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan mengurus suami, perempuan boleh memasuki bidang yang seharusnya untuk laki-laki yaitu di sektor publik tetapi perempuan harus tetap mengemban tugas atau mempertahankan kodrat keperempuanannya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui serta kewajiban-kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Jadi, walaupun perempuan (isteri) bekerja di luar rumah dan memiliki karier sendiri, perempuan tetap harus menjalankan tugas-tugas alamiahnya.

Berdasarkan perumusan di atas maka perempuan memiliki beban ganda yaitu antara pekerjaan domestik dan pekerjaan publik. Sehingga perempuan harus menanggung beban kerja yang berat dan jam kerja yang lebih panjang. Akibatnya, di

satu sisi perempuan harus mengerjakan pekerjaan domestiknya dengan baik, di sisi lain perempuan dituntut untuk bekerja maksimal di kantornya.

Harus diakui bahwa dalam masyarakat masih terdapat nilai-nilai sosial budaya yang belum siap menerima pergeseran nilai perubahan sosok perempuan masa kini. Stereotip perempuan masih didominasi oleh pola-pola lama, sehingga kaum laki-laki yang cenderung memperoleh kesempatan yang lebih besar, sedangkan kaum perempuan hanya sebagai cadangan untuk urusan tradisional semata. Secara tidak langsung perempuan telah mengalami subordinasi dan mengalami marginalisasi oleh laki-laki. Kendala inilah yang menghambat peluang serta kemampuan perempuan untuk beraktualisasi diri dan mandiri. Namun tidak hanya ketidakadilan seperti itu yang dialami oleh perempuan. Perempuan juga kerap kali dijadikan obyek kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis, verbal maupun non verbal. Kekerasan fisik misalnya pemukulan isteri oleh suami, ajakan paksa untuk berhubungan seksual dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan dalam bentuk psikis misalnya pelecehan, sendau gurau yang tidak sopan yang melecehkan seks perempuan serta ancaman seks lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Stereotip perempuan dan laki-laki di masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Stereotip berkaitan dengan pelabelan yang mengakibatkan kaum perempuan berada pada posisi dan kondisi yang tidak menguntungkan seperti perempuan identik dengan wilayah domestik dan laki-laki sebagai penguasa publik. Perbedaan gender ini telah melahirkan perbedaan peran gender yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Proses terjadinya perbedaan peran gender ini dilandasi oleh sosialisasi nilai-nilai budaya yang lebih banyak mendukung konsep agama yang memapankan ketimpangan peran sosial menurut jenis kelamin ini. Perbedaan peran gender ini dalam perkembangannya kemudian dibakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakannya. Hal ini justru memperkuat terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Dengan dibakukannya peran isteri sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengurus rumah tangga, berarti peran kaum perempuan yang resmi diakui adalah peran domestiknya. Padahal sejak dahulu perempuan tidak hanya melakukan peran domestik, tetapi juga telah banyak berperan di sektor publik. Memang tidak dapat dipungkiri masih banyak yang menganggap tugas seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga semata. Namun, pandangan tersebut hanya terdapat pada masyarakat yang masih memegang adatnya dengan kuat. Seiring dengan perkembangan dan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin maju, maka pemikiran tersebut lambat laun kurang mendapatkan dukungan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya kaum perempuan ikut berpartisipasi dan dapat mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki di berbagai aspek kehidupan khususnya di luar kegiatan rumah tangga.

Pada dewasa ini, kehidupan peran ganda perempuan merupakan salah satu perwujudan emansipasi perempuan dalam pembangunan. Peran ganda yang dimaksud adalah peran kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Seperti pada tenaga kerja perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja di kantor sebagai perempuan karier dimana dari pekerjaannya didapatkan gaji yang digunakan sebagai nafkah tambahan keluarga.

Namun untuk mengaktualisasikan keikutsertaan perempuan di sektor publik, dewasa ini perempuan tidak terlepas dari faktor-faktor yang dikatakan sebagai penghambat gerak perempuan, seperti faktor teologis, kultural, struktural, dan personal. Perempuan telah mampu memainkan peranan yang ada untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap kegiatan yang berkaitan dengan publik. Hanya saja masih ada berbagai pendapat yang belum dapat menerima perempuan untuk berkiperah di sektor publik, salah satunya adalah faktor kultural yang sampai sekarang menjadi beban bagi perempuan itu sendiri.

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terhadap aktualisasi kariernya?
2. Bagaimana dampak yang dialami oleh perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang akibat diskriminasi gender?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aspek-aspek kendala yang dapat menghambat aktualisasi perempuan bekerja yang berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diskriminasi gender terhadap perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Memberi informasi bagi pembuat kebijaksanaan yang banyak berkaitan dengan masalah perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan.

1.5 Fokus Kajian Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diskriminasi gender terhadap perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Adapun dampak-dampak yang muncul yaitu subordinasi perempuan, marginalisasi, stereotip gender, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.

Subordinasi adalah suatu pandangan yang memposisikan perempuan dengan segala potensinya lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dipandang kurang mampu, sehingga diberi tugas yang ringan dan mudah. Misalnya yang dapat dijadikan contoh yaitu jabatan bendahara yang berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dipegang oleh perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa pekerjaan yang sesuai dengan perempuan adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan ataupun ketelitian. Itulah sebabnya mengapa laki-laki selalu melimpahkan pekerjaan yang tidak begitu memerlukan kekuatan otot kepada perempuan karena perempuan dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan seperti pekerjaan yang laki-laki lakukan. Dalam promosi jabatan pun sering terlihat bahwa laki-laki lebih diutamakan untuk menduduki jabatan strategis, padahal banyak perempuan yang mampu untuk menempati jabatan tersebut.

Marginalisasi merupakan proses penyingkiran terhadap perempuan akan potensi yang dimilikinya sehingga menyebabkan kemiskinan. Misalnya dalam keluarga, perempuan tidak boleh memimpin dan memerintah suami, sekalipun suami tidak bisa memimpin. Kemudian perempuan juga telah memarginalkan diri mereka sendiri karena tidak percaya diri atau "minder", sebagai contoh yaitu ketika peneliti sedang melakukan wawancara dengan salah satu pegawai perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP gaya beliau berbicara terkesan "malu-malu" dan takut salah. Hal ini menandakan bahwa beliau telah mengalami marginalisasi terhadap dirinya sendiri.

Stereotip gender adalah pelabelan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dimana seringkali bersifat negatif dan melahirkan ketidakadilan bagi perempuan. Misalnya, pandangan yang beranggapan bahwa tugas dan fungsi perempuan hanyalah melaksanakan tugas domestik. Sehingga ketika perempuan memasuki ruang publik, maka jenis pekerjaan dan kegiatannya seringkali dianggap sebagai perpanjangan dari peran domestiknya.

Perempuan yang sudah berkeluarga dalam meniti kariernya cukup mendapat hambatan dengan bertambahnya peran yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai

pekerja. Oleh karena itu, meskipun perempuan memiliki pekerjaan di luar rumah, perempuan harus tetap dapat menjalankan tugas-tugas alamiahnya sebagai perempuan sehingga beban kerja perempuan menjadi lebih panjang dan berat. Adanya beban ganda yang disandang perempuan tersebut memaksa perempuan agar bisa membagi waktu sebaik-baiknya antara karier dan keluarga.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan pun tidak hanya terjadi di rumah melainkan di tempat kerja, misalnya sendau gurau yang melecehkan seks perempuan ataupun colekan nakal dari pegawai laki-laki. Kemudian kekerasan yang terjadi di dalam rumah misalnya pemukulan isteri oleh suami atau kata-kata kasar yang dilontarkan suami kepada isteri dan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang berada di Jl. Raya Wahid Hasyim No. 110 Jombang. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan pertimbangan bahwa di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan lokasi yang representatif dengan judul yang peneliti angkat yaitu mengenai perempuan bekerja dimana obyek yang diteliti signifikan dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu perempuan karier yang bekerja pada instansi pemerintahan.

1.6.2 Penentuan Informan

Dalam penentuan obyek (informan) yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni penentuan informan (obyek) dengan sengaja dan jelas. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 9 (sembilan) tenaga kerja perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yakni pada Bagian Umum dengan jumlah responden 7 (tujuh) orang perempuan dan pada Bagian Persidangan dengan jumlah responden 2 (dua) orang perempuan. Namun sebelum peneliti menentukan responden perempuan, terlebih dahulu peneliti

menentukan informan kunci. Dalam penentuan informan kunci peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum dengan pertimbangan Kepala Bagian Umum lebih mengerti situasi dan kondisi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, kemudian karena posisi strukturalnya berada tepat di bawah Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang. Selain itu alasan peneliti tidak menggunakan Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang sebagai informan kunci adalah karena saat peneliti melaksanakan penelitian beliau tidak ada di tempat (sedang menunaikan ibadah haji) sehingga peneliti menemui Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagai informan kunci. Informan kunci di sini juga berfungsi sebagai alat kros cek data (triangulasi data) selama dan setelah penelitian sehingga diperoleh data yang tidak saling silang. Setelah menunjuk informan kunci (*key informan*) kemudian informan kunci akan menunjuk informan berikutnya hingga data yang dikumpulkan telah mencapai titik jenuh atau dengan kata lain peneliti tidak menemukan informasi atau data baru lagi (Hamidi, dalam Moleong, 2001). Dalam penentuan informan berikutnya ini peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi yang digunakan yakni tenaga kerja perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Adapun tenaga kerja perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berjumlah sembilan orang, antara lain tujuh orang di Bagian Umum dan tiga orang pada Bagian Persidangan.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2001: 3) mendefinisikan *penelitian kualitatif* adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekuasaannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilabannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001: 3) mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, individu atau organisasi dalam variabel atau hipotesis tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya melainkan dipandang secara holistik yaitu secara keseluruhan sebagai suatu keutuhan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta serta fenomena-fenomena yang diselidiki secara otomatis, faktual (tidak dibuat-buat), dan akurat sesuai dengan fakta yang ada (Whitney, dalam Nazir, 1988: 63). Penelitian berusaha memahami makna peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang ada dalam situasi tertentu dan mendeskripsikan fakta sebagaimana adanya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara (*indepth interview* serta menggunakan wawancara terstruktur) terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi lapangan dan data dari instansi yang bersangkutan yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang serta mengadakan studi pustaka guna menunjang data yang diperoleh. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1.6.4.1 Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pencarian data dalam penelitian melalui pengamatan terhadap obyek suatu peristiwa atau suatu tujuan yang akan diselidiki dengan disertai pencatatan secara sistematis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (lihat Hadi dalam Moleong, 2001). Metode observasi merupakan metode yang peneliti terapkan pada awal penelitian di lapangan karena peneliti perlu mengetahui secara mendalam lokasi serta perangkat yang ada di dalam kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

sehingga didapatkan gambaran tentang lokasi dan sejumlah peristiwa yang dapat dijadikan bahan penelitian.

1.6.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi (tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih) antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau sumber data (*interviewee*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur supaya wawancara atau percakapan antara peneliti dengan responden tidak kaku atau mengalir apa adanya tanpa adanya tata urutan pertanyaan yang baku melainkan peneliti lebih mengikuti alur percakapan namun tetap mengikuti topik yang dibahas sehingga didapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan tidak bias. Oleh karena peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur maka peneliti yang sekaligus sebagai pewawancara menerapkan metode wawancara secara mendalam (*indepth interview*) guna mendapatkan informasi serta data yang lebih kaya dan mendalam sehingga proses *understanding of understanding* (pemahaman) dapat tercapai.

Peneliti melakukan wawancara pada jam istirahat kantor yaitu antara pukul 12 sampai 12.30 siang di meja kerja masing-masing responden. Peneliti tidak mengadakan wawancara di rumah masing-masing responden karena menurut para informan waktu di rumah adalah waktu untuk keluarga sepenuhnya. Melalui metode ini diharapkan peneliti dapat menggali data (informasi) secara mendalam. Metode wawancara dipergunakan oleh peneliti guna mengklarifikasi sejumlah data dan informasi yang dikumpulkan pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti sehingga dapat dipahami lebih jelas.

1.6.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi bisa berupa catatan lapangan yang diperoleh di lapangan ketika melakukan penelitian. Kemudian catatan lapangan tersebut digeneralisasikan

menjadi catatan yang lengkap sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Menurut Molcong (2001: 161), dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permainan seorang penyelidik. Jadi, dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah bukan berupa rekaman (*record*) melainkan berupa tulisan-tulisan singkat peneliti selama wawancara di lapangan.

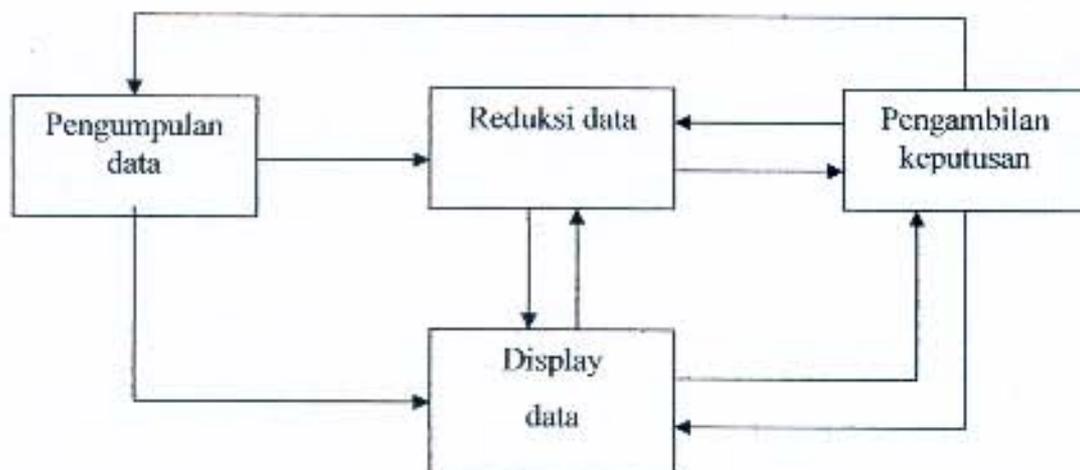
Dokumen-dokumen sangat bermanfaat sekali bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan hasil penelitian yang didokumentasikan. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap atas data yang diambil secara langsung selain dari informasi yang didapat melalui pengumpulan data-data melalui studi pustaka, data-data lembaga, serta catatan peneliti ketika di lapangan.

Dalam penelitian ini data lembaga yang diperoleh yaitu berupa bagan struktur keorganisasian dalam kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (memuat tugas dan fungsi masing-masing bidang) dan data statistik Kabupaten Jombang (Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2003). Data-data lembaga tersebut dipergunakan guna menambah informasi yang diinginkan sehingga menjadi informasi yang lebih tepat dan akurat. Selain itu pula, data lembaga dipergunakan untuk membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara sehingga menjadi data yang utuh dan tidak bias.

1.6.5 Teknik Analisa Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, dan dari data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan melalui data-data dari instansi yang terkait guna menunjang penelitian ini. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sepenuhnya secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data kualitatif memfokuskan pada penunjukan makna, deskriptif, penempatan data pada konteksnya masing-masing dan melukiskannya dalam kata-kata.

Setelah semua data terkumpul baik dari observasi, wawancara dan data-data dari sumber yang lainnya kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah berikutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Kemudian hasil reduksi data didisplay secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus atau tema yang hendak dipahami atau dimengerti dasar persoalannya, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengamatan dan pengertiannya. Pengumpulan data, reduksi data, dan display data serta pengambilan kesimpulan bukanlah proses yang langsung melainkan suatu siklus yang interaktif, bersifat bolak-balik dan saling berhubungan. Proses kerja analisis ini dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber: Bungin (2003: 69)

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data dan dilanjutkan dengan melakukan penafsiran data.

1.6.6 Keabsahan Data

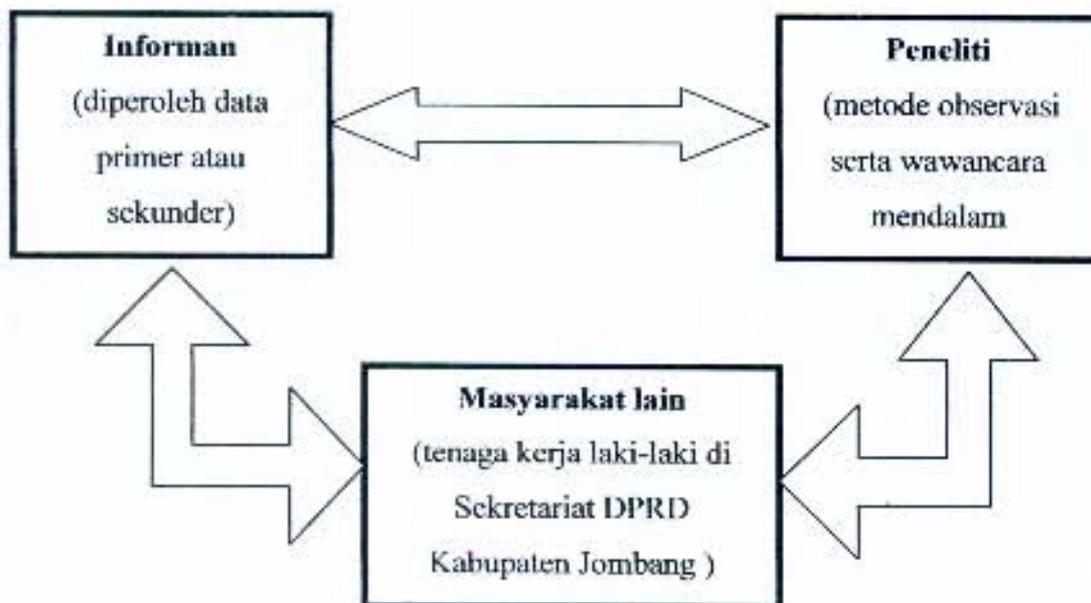
Setelah data dianalisis maka langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria-kriteria tertentu. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini, peneliti menggunakan metode *triangulasi* yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh (Moleong, 2001: 178).

Terdapat empat macam triangulasi yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Namun, dalam proses triangulasi, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi dengan "sumber". Teknik triangulasi dengan "sumber" dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti membandingkan pendapat antara tenaga kerja perempuan dengan tenaga kerja laki-laki yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang; dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi merupakan proses penggalian data dengan melakukan konfirmasi dengan pihak di luar obyek penelitian. Hal ini berarti bahwa peneliti melakukan konfirmasi dengan pihak di luar informan yakni dengan tenaga kerja laki-laki yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Jadi, dalam penarikan keabsahan data terjadi bentuk dialog tiga subyek yaitu peneliti, informan, dan masyarakat di luar informan.

Metode triangulasi digunakan untuk mengadakan klarifikasi terhadap sejumlah bahan, data, dan informasi yang dikumpulkan dan memverifikasi hasil observasi atau interpretasi yang telah dibuat oleh peneliti (Salim, 2001). Sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang

sedang diteliti dan supaya data yang diperoleh dapat komprehensif dan akurat. Metode triangulasi dengan memanfaatkan informan lain di luar informan yang ada dapat dilihat melalui gambar 1.2 di bawah ini:



1.6.7 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan observasi atau pengamatan tentang lokasi penelitian yaitu di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Kemudian, setelah observasi dilaksanakan maka langkah selanjutnya yaitu menentukan informan kunci secara purposive sampling yaitu menentukan orang yang dianggap mengerti dan menguasai keadaan, situasi dan kondisi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti laksanakan secara pasti. Selanjutnya setelah menentukan informan kunci, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci dimana wawancara dilaksanakan di kantor dan di rumah informan kunci.

Tahap berikutnya, informan kunci akan menunjuk informan selanjutnya yang lebih berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian setelah peneliti mendapatkan informan tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan informan lainnya secara purposive sampling dan dalam penelitian ini didapatkan sembilan informan atau responden. Setelah itu, peneliti melaksanakan wawancara secara

individual dengan responden di meja kerja masing-masing responden sesuai dengan responden mana yang memiliki waktu luang. Tetapi, dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan pada jam istirahat kantor sekitar jam 12 sampai 12.30 siang dan sekitar jam 2 siang ke atas karena pada saat itu responden banyak yang memiliki waktu luang. Wawancara tidak peneliti lakukan di rumah masing-masing responden dengan alasan bahwa jam pulang kantor yang sudah sore dan bahkan terkadang sampai malam sehingga waktu di rumah adalah waktu istirahat dan waktu hanya untuk keluarga. Kemudian jika wawancara dilakukan pada hari libur, biasanya waktu tersebut digunakan sebagai hari keluarga. Jadi peneliti dalam melakukan wawancara menyesuaikan dengan jam kosong para responden di kantor.

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis, yaitu dengan cara menelaah seluruh data. Data yang telah dianalisis, kemudian direduksi dan dibuat semacam rangkuman atau display data. Tahap terakhir yaitu menarik suatu kesimpulan. Proses analisa data ini merupakan siklus yang interaktif dan bukan merupakan siklus yang langsung jadi.

Guna menunjang keabsahan data, peneliti melakukan krosec data dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti melakukan konfirmasi dengan pihak di luar informan atau responden. Dalam hal ini peneliti menggunakan informan lain seperti tenaga kerja laki-laki yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Metode ini dilakukan selama penelitian berlangsung dimana peneliti sedang menggali data terhadap informan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Profil Perempuan dan Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 789) menyatakan bahwa, "Profil adalah pandangan dari samping (tt wajah orang); Raut muka; Tampang; Sketsa biografis". Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran tentang perempuan sebagai suatu obyek dalam kesehariannya baik dalam keluarga maupun dalam masyarakatnya. Sedangkan menurut Achmad (dalam Ihromi, 1995: 249) menyatakan bahwa, "Profil perempuan diuraikan sebagai seperangkat ciri-ciri yang secara keseluruhan memberi gambaran tentang keberadaan perempuan Indonesia sebagai pribadi mandiri dalam kebersamaan dalam lingkungan keluarga, bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan yang sedang giat-giatnya membangun".

Perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai *the other sex*. Dikotomi *nature* dan *nurture*, misalnya telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini, yang satu memiliki status yang lebih rendah dan yang satunya sebaliknya. Perempuan yang mewakili sifat alam (*nature*) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*nurture*). Usaha membudayakan perempuan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi dari konsep dan *common sense* tentang pemosisian yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke dalam sektor domestik dan publik dimana perempuan dianggap sebagai orang yang berkiperah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan. Adanya

dua dikotomi domestik dan publik selanjutnya membentuk dua domain yang merupakan wilayah kekuasaan yang menggambarkan dominasi dan subordinasi.

Perempuan adalah calon ibu dan penerus keturunan. Oleh karena itu, sebagai ibu yang baik seorang perempuan tidak hanya mampu memberikan keturunan, tetapi juga harus mampu menghasilkan anak-anak yang berguna. Pengasuhan anak-anak yang dilahirkan tentu pula menjadi tanggung jawab perempuan sehingga kenakalan anak-anak dianggap sebagai tanda dari kegagalan perempuan di dalam mengurus anak. Konsep demikian tidak hanya mempengaruhi sikap dan perilaku sosial laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga menentukan bagaimana perempuan mengambil tempat dan peran di dalam keseluruhan proses sosial. Selain itu pula sebagai perempuan hendaknya dapat berperan sebagai isteri dan pendamping suami yang setia, termasuk dengan urusan domestik. Ternyata pekerjaan domestik sudah menjadi tanggung jawab seorang isteri atau perempuan. Ideologi familialisme tersebut telah menempatkan perempuan sebagai ibu sekaligus sebagai isteri yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Urusan Peranan Wanita merumuskan lima peran perempuan yakni (1) sebagai isteri yang membantu suami; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka; (3) sebagai manajer yang mengelola rumah tangga sebagai rumah bagi suami dan anak; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor; dan (5) sebagai anggota organisasi. Rumusan-rumusan tersebut menunjukkan betapa beratnya beban seorang perempuan. Rumusan tersebut pula telah diimplementasikan dalam kegiatan PKK di pedesaan.

Pada konsep *nature* dan *nurture*, perempuan diibaratkan alam (*nature*) yang harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*nurture*). Sehingga seolah-olah perempuan harus keluar dari bidang domestik dan masuk ke dalam bidang publik untuk menjadi manusia yang berbudaya. Transformasi seperti ini, dari domestik ke publik, seperti juga proses feminisasi secara umum tidak memberikan basis penting bagi tawar-menawar kekuasaan. Pergeseran semacam ini pula sesungguhnya ikut memproduksi realita tentang stratifikasi bidang kegiatan, dimana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada bidang domestik.

Usaha mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam bidang publik, sama halnya dengan memaksa perempuan untuk meninggalkan bidang domestik yang dianggap kurang prestisius. Dengan kata lain, yang diperoleh selanjutnya bukanlah kualitas yang semakin baik melainkan lebih menunjukkan pada angka-angka partisipasi perempuan. Ideologi feminisme adalah salah satu yang mendukung perempuan terlibat aktif dalam kegiatan publik. Secara tidak langsung mereka mengakui keabsahan proses konversi dari *nature* menjadi *nurture* untuk menjadi manusia. Menjadi manusia (bagi perempuan) dalam kerangka ini berarti merubah perempuan menjadi laki-laki, paling tidak menjadi sosok seperti yang diinginkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, gerakan-gerakan feminisme lebih melayani kepentingan penguasa daripada kepentingan perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, feminisasi merupakan jalan pengingkaran terhadap jati diri perempuan itu sendiri.

Masuknya tenaga kerja perempuan ke dalam sektor publik sehingga memiliki peran ganda ternyata sampai sekarang masih terjadi pro dan kontra, disatu sisi ada yang menyetujuinya dan tidak sedikit pula yang menolaknya. Dikotomi ruang publik dan domestik yang timpang menempatkan pihak perempuan sebagai pihak yang ternormalkan. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian memunculkan bahwa perempuan menjadi *the second sex* yang disebut juga sebagai "warga kelas dua" yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Sebagai contoh yaitu adanya pembagian kerja secara seksual yang memposisikan perempuan sebagai penguasa domestik dan laki-laki berhak atas ruang publik. Budiman (1985: 2) mengungkapkan bahwa, "Pembagian kerja secara seksual ini berhubungan dengan adanya anggapan tentang perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki". Hal ini berhubungan dengan teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* memandang perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua jenis kelamin tersebut. Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan tercipta melalui proses belajar dari lingkungan. Teori *nurture* percaya bahwa perempuan pun dapat mengembangkan diri sebagaimana laki-laki apabila lingkungan memberi kesempatan, sehingga pada dasarnya teori ini menganggap kemampuan perempuan

dan laki-laki dalam bidang publik adalah sama. Berbeda dengan teori nature yang memisahkan laki-laki dan perempuan berbeda yakni perempuan hanya mengerjakan tugas-tugas domestik semata, sedangkan laki-laki mengurus bidang publik.

Pembagian kerja secara seksual seperti yang diungkapkan di atas, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Pekerjaan-pekerjaan perempuan dianggap kurang penting bila dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki. Peranan perempuan dalam semua situasi sosial yang meskipun penting belum sama dengan peranan laki-laki dalam situasi yang sama. Keadaan ini merupakan gambaran tentang subordinasi perempuan dalam masyarakat yang terdapat hampir di semua masyarakat. Situasi dimana peranan laki-laki dianggap lebih penting daripada perempuan kemudian menghasilkan kepasrahan perempuan terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya. Fenomena tersebut terjadi akibat adanya ideologi gender yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Saptari dan Holzner (1997: 2), gender adalah keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan. Akibat ideologi gender perempuan cenderung dianggap sebagai ibu rumah tangga yang selalu mengurus dan melayani anak-anak, suami serta keluarganya. Perempuan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kesempatan kerja baik di negara maupun dalam keluarga. Walaupun terdapat kesempatan kerja, maka laki-lakilah yang diprioritaskan. Jika peluang untuk laki-laki menjadi terbatas, mereka akan mendesak dan melakukan marginalisasi terhadap perempuan.

Tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat kita masih terdapat ideologi gender yang membedakan laki-laki dan perempuan bukan hanya dari jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan peranan masing-masing jenis kelamin. Menurut Bronstein (dalam Suyanto dan Hendrarso, 1996: 152), pada sebagian masyarakat di dunia ketiga sudah lazim terjadi apa yang disebut pembagian kerja secara seksual. Laki-laki secara

tipikal berada pada posisi dominan, yaitu sebagai pencari nafkah (*bread winner*) atau sebagai pekerja produktif dan menyanggah peran sebagai penghasil pendapatan utama. Sedangkan perempuan ditempatkan sebagai "nyonya rumah" (*home maker*) yang bertanggung jawab atas segala pekerjaan reproduktif maupun pekerjaan produktif yang terkait dalam organisasi rumah tangga. Helena Lopata (dalam Ollenburger and Moore, 2002: 119) mendefinisikan 'nyonya rumah' (*house wife*) sebagai perempuan yang bertanggung jawab mengurus rumahnya, apakah ia melakukan tugas-tugas itu atau mempekerjakan orang-orang untuk melakukannya. Seorang laki-laki atau gadis dapat berkelakuan seperti nyonya rumah tetapi mereka biasanya dikenal sebagai pengganti pembantu, atau orang yang menyimpang. Lopata kemudian memakai istilah nyonya rumah ini untuk menunjukkan kedudukan dan peran sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perempuan sebagai nyonya rumah menyanggah dua peran sekaligus yakni pekerjaan produktif dan pekerjaan reproduktif sehingga perempuan mempunyai beban ganda. Adanya pekerjaan ganda tersebut seringkali menyulitkan kaum perempuan. Lain halnya dengan peran ganda laki-laki yang kurang bisa diandalkan yang dikarenakan adanya ideologi gender (Yuarsa, dalam Abdullah, 1997).

Perubahan dari agraris menuju industrialisasi membawa dampak perubahan budaya. Di sini pula ideologi gender kembali membuat kerangka berpikir tentang di mana sebaiknya laki-laki berperan. Industrialisasi yang bercirikan kapitalisme telah mengajak manusia belajar dan berpikir siapa yang sepatutnya berkuasa dan dikuasai. Fungsi memelihara hidup, termasuk anak, telah menempatkan perempuan untuk tetap berada pada sektor domestik. Situasi inilah yang mematangkan budaya patriarki. Dalam budaya patriarki terjadi penyimpangan-penyimpangan yang didukung oleh ideologi gender itu sendiri sehingga terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Sayangnya, belum semua perempuan menyadari ketidakadilan ini sebab sudah terkunci oleh ideologi gender.

Berubahnya struktur industrialisasi mengakibatkan beralihnya pekerjaan domestik ke publik. Namun, laki-laki tetap berada pada posisi puncak, kaum laki-laki

kembali menggeser posisi kaum perempuan. Dan, sebagian besar pekerjaan perempuan seperti memasak, menjahit, dan merawat anak dapat dilakukan laki-laki, tetapi pekerjaan tersebut dilakukan hanya sekedar hobi atau hanya untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai suatu kewajiban sebagaimana halnya perempuan. Namun ada juga yang menjejakkan pekerjaan tersebut sebagai suatu profesi, seperti tukang masak (koki atau chef) sekarang banyak didominasi oleh kaum laki-laki, ataupun salon-salon kecantikan banyak juga terdapat kaum laki-laki. Dari sini terlihat bahwa kaum perempuan kembali termarginalkan oleh kaum laki-laki.

Ideologi gender merupakan konstruksi nilai-nilai yang dibuat oleh masyarakat dan masyarakat selalu dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, subordinasi perempuan pun dapat bergeser. Namun, pergeseran yang terjadi tidaklah semudah seperti kita membalikkan tangan, perubahan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Perubahan, pergeseran atau mudahnya nilai-nilai gender dan perkembangan perempuan dalam perannya ini pada dasarnya adalah seiring dengan adanya proses transformasi ekonomi.

Tilly dan Scott yang dikutip oleh Usman (1998: 115) mengungkapkan bahwa, "Proses transformasi ekonomi dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. The Family-Based Economy.
2. The Family-Wage Economy.
3. The Family-Consumer Economy".

Pada periode pertama, rumah tangga masih menjadi basis kegiatan ekonomi, kegiatan produksi banyak dilakukan di dalam rumah. Kerja di sini dikonsepsikan sebagai aktivitas produktif bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Semua anggota keluarga adalah tenaga kerja yang mempunyai kontribusi. Perempuan tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga melainkan juga terlibat dalam kegiatan di luar rumah. Periode kedua ditandai dengan adanya transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian ke perdagangan sejajar dengan perkembangan kapitalisme. Pada periode ini tenaga kerja tidak lagi terkonsentrasi pada kegiatan rumah tangga tetapi di luar rumah dengan mendapatkan upah. Hal ini berpengaruh terhadap karakter pekerjaan

perempuan dimana dalam hal ini terbentuk apa yang lazim disebut peran ganda. Di satu pihak menjadi tenaga kerja yang mendapat upah di lain pihak sebagai ibu rumah tangga. Periode ketiga ditandai dengan adanya kehadiran negara (campur tangan pemerintah) dalam sistem upah tenaga kerja. Karena adanya perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas maka anggota rumah tangga lebih banyak melakukan fungsi konsumsi dan reproduksi (termasuk perempuan). Meskipun dalam periode ini produksi lebih banyak berada di luar rumah, tenaga kerja dari anggota keluarga mempunyai kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti ini produktivitas perempuan akan dapat lebih tinggi daripada periode sebelumnya.

Kemajuan teknologi dan ekonomi pada akhirnya juga akan menyebabkan perubahan dalam pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat. Kemajuan teknologi tidak lagi menuntut kekuatan otot manusia sehingga hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk lebih dapat berpartisipasi dalam mencapai kenaikan tingkat ekonomi keluarga dengan jalan mereka terlibat langsung dalam kegiatan mencari nafkah, yang akhirnya juga dapat membuat kaum laki-laki (suami) menyadari salah satu manfaat dari bekerjanya kaum perempuan (isteri). Sayogya (1983: 29) mengatakan bahwa, "Pola baru dalam pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki di bidang pekerjaan mencari nafkah akan berubah, artinya dengan menadapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan sebagai penggerak pembaharuan, sehingga menjadi cakap, maka peranan perempuan dalam mencari nafkah akan nyata pula". Dari ungkapan tersebut maka dapat dikatakan di sini bahwasannya kaum perempuan atau isteri pada era modern saat ini sudah dapat mempunyai pekerjaan di luar rumah, mempunyai penghasilan dan karier sendiri yang berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki.

Mengenai definisi karier, menurut Poerwodarminto (1989: 591) yaitu:

1. Perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya.
2. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa karier merupakan suatu proses perkembangan seseorang dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Adanya pola baru

yang muncul pada dasawarsa terakhir ini yaitu mengenai kedudukan perempuan (isteri) dalam dunia kerja maka karier seseorang perempuan (isteri) di tempat pekerjaannya dapat diasumsikan sebagai proses perkembangan dan kemajuan yang diharapkan oleh seorang perempuan (isteri) di tempat pekerjaan dalam aktivitasnya membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tentunya karier seorang perempuan (isteri) ini diperoleh melalui berbagai jalan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karier perempuan tersebut secara umum dilihat dari pekerjaan yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, pangkat yang dimiliki, dan gaji atau upah yang dimiliki.

Definisi pekerjaan, jabatan, pangkat dan gaji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 960) yakni "Pekerjaan adalah pencaharian ... apa yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah". Dalam hal ini pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan seorang isteri yang bekerja di ruang publik untuk mendapatkan nafkah maupun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pengertian jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 420), "Jabatan adalah tugas dalam pemerintahan atau organisasi". Jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang dipegang atau dimiliki seseorang dalam pekerjaannya dalam upaya mendapatkan nafkah sebagaimana pengertian pekerjaan di atas. Kemudian pengertian pangkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 918) menyebutkan, "Pangkat adalah tingkatan dalam kepegawaian". Sedangkan pengertian gaji dalam buku yang sama (1996: 312) adalah balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu".

Munculnya perempuan yang bekerja di luar rumah adalah suatu kenyataan sosial yang semakin menggejala, sehingga banyak perempuan yang berorientasi mengejar peran-peran publik yang diinginkan. Menurut Abdullah (1997: 8), banyaknya orientasi perempuan berperan publik dikarenakan adanya struktur sosial yang timpang, yaitu dikotomi domestik dan publik yang menyatakan bahwa perempuan terpenjara dalam bidang domestik, sementara laki-laki dengan bebas terlibat dalam bidang publik.

Banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah (misalnya di kantor-kantor), dalam hal ini penulis membatasi pekerjaan dalam artian formal yaitu pada instansi pemerintah, selain menunjukkan peran serta perempuan di sektor publik juga menggambarkan pula berapa banyak peluang-peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan di Indonesia. Sebagaimana menurut Breman, dalam Manning dan Effendi (1991: 139) menjelaskan bahwa:

Sektor formal digunakan dalam pengertian pekerja bergaji atau harian dalam pekerjaan permanen, seperti dalam pekerjaan permanen, seperti dalam pekerjaan dalam perusahaan industri, kantor pemerintah dan perusahaan besar lain. Ini meliputi: a. sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan, yang merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalin dan amat terorganisir; b. pekerjaan yang secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian; c. syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum.

Pengertian kerja menurut Effendi (1987) adalah seseorang yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan uang atau barang atau mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh penghasilan. Dengan bekerja isteri dapat membantu secara ekonomi. Selain itu juga menunjukkan kemampuan dan keterampilannya, mengembangkan dirinya sehingga status sosial di masyarakat dapat meningkat. Sedangkan Suwondo (1988) mengatakan bahwa, "Perempuan perlu aktif dan membina karier oleh karena pemenuhan tuntutan hidup di masa mendatang merupakan tanggung jawab bersama laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri". Istilah karier di sini hanya menunjuk pada peningkatan makna (*meaningfulness*) dan muatan atau kekayaan (*enrichment*) dari pekerjaan, dan tidak selalu mengacu pada peningkatan posisi kerja dalam jenjang kerja profesional tertentu (Ihromi, 1995: 331).

Dilihat secara ekonomi, bagi isteri yang bekerja di luar rumah pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang mereka bekerja adalah untuk menambah pendapatan dalam mencukupi kebutuhan keluarga, meskipun tidak jarang sebenarnya kehidupan mereka tidaklah kekurangan dalam hal materi. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh As'ad (1981: 46) bahwa "Seseorang

beraktivitas karena berharap akan membawa pada keadaan yang lebih memuaskan dari keadaan sekarang”.

Pemilihan jenis pekerjaan sangat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang pernah dicapai. Bagi isteri yang telah berhasil melewati jalur pendidikan formal, cenderung menginginkan pekerjaan dalam sektor formal, dengan harapan didapatkannya upah yang lebih baik, ketentraman yang lebih besar dan prestise sosial yang lebih tinggi, selain sektor modern yang merupakan wadah yang tepat bagi pengembangan karier dan profesi mereka. Seperti diketahui, pembagian kerja di sektor formal adalah terspesialisasi serta menuntut pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi.

Berkaitan dengan pendidikan, menurut Peaslee dalam Wirutomo (1990: 436), pendidikan membantu menghancurkan cara pandang tradisional. Begitu pula menurut Soekanto (1994: 252) bahwa pendidikan memberikan suatu nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal yang baru dan bagaimana berpikir secara ilmiah.

Dewasa ini keterlibatan perempuan ke dalam ruang publik menandakan bahwa perempuan telah merespon langsung perubahan ekonomi rumah tangga dan perkembangan aspirasi perempuan. Banyak perempuan yang pergi ke kota-kota lain untuk bekerja sebagai pekerja pabrik atau pergi ke daerah sekitar untuk menjadi buruh atau pedagang di berbagai pasar. Orang kota banyak yang bekerja di kantor-kantor sejalan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan kesadaran tentang keterlibatan dalam kegiatan di luar rumah semakin menggejala. Gejala keterlibatan perempuan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau isteri, tetapi juga sebagai pekerja dan perempuan karier.

Dengan peluang kerja yang dapat diraih oleh isteri, membuka jalan untuk berkarier. Oleh karena itu, dalam bekerja tidak menutup kemungkinan untuk berkarier. Untuk menjelaskan kata “karier”, menurut Heronymus (1996: 8) perempuan karier adalah perempuan yang berpendidikan dan mempunyai prestasi

jabatan. Dengan prestasi dan pendidikan yang dimilikinya, mereka dapat berkarier di instansi-instansi pemerintah sekaligus senantiasa mengembangkan pendidikannya secara terus-menerus dengan tuntutan pekerjaan dan pencapaian prestasi.

Kemantapan perempuan untuk berkarier, seperti yang diungkapkan oleh Rustian dalam *Femina*, (25 April 1990) bergantung pada apa yang melandasi ia berkeinginan berkarier di luar rumah. Jika ia berkeinginan karena kebutuhan ekonominya yang diutamakan maka ia akan melihat pekerjaan dan keuntungan dari imbalan (uang). Jika segi finansialnya sudah terpenuhi maka yang dilakukannya adalah untuk aktualisasi diri. Pada kelompok yang terakhir ini, berkarier bukan semata-mata mencari uang, tetapi lebih dari itu, yaitu mengembangkan potensi diri dan aktualisasi diri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan (isteri) dalam memutuskan untuk bekerja produktif menurut Hardono (1986: 87) adalah sebagai berikut:

1. Karena keadaan ekonomi, dengan bekerja memungkinkan seorang perempuan dapat menambah *income* rumah tangganya sehingga dapat meringankan beban keluarga dalam mencukupi kebutuhan kehidupannya.
2. Didorong oleh keinginan untuk membentuk karier, hal ini ditunjang oleh adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki, kesempatan kerja serta sifat pekerjaan yang dialami.
3. Karena pembangunan memerlukan tenaga perempuan, norma-norma kehidupan dewasa ini telah mengharuskan perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan sebagaimana kaum laki-laki.

Didukung oleh pendapat L.W. Hoffinan dan Ivan, dalam Sayogya (1985: 58) yaitu adanya tiga alasan perempuan bekerja yaitu uang, peranan sosial, dan pengembangan pribadi. Begitu pula menurut Munandar (1985: 231), ada beberapa motivasi yang dapat mendorong seorang perempuan bekerja yakni:

1. Untuk menambah penghasilan.
2. Secara ekonomi tidak tergantung pada suami.

3. Untuk menghindari kebosanan atau untuk mengisi waktu yang senggang.
4. Karena ketidakpuasan dalam pernikahan.
5. Karena mempunyai minat atau keahlian terhadap yang ingin dimanfaatkan.
6. Untuk memperoleh status.
7. Untuk mengembangkan diri.

Sedangkan perempuan yang bekerja di luar rumah dalam hal ini adalah perempuan yang bekerja di sektor formal, khususnya sebagai pegawai negeri. Poerwadarminta (1994: 723) berpendapat bahwa, "Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada negara". Dan dipertegas oleh Nainggolan (1985: 119) bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah:

1. Bekerja pada negara atau sebagai aparaturnegera.
2. Mempunyai tingkatan yang berdasarkan pendidikan.
3. Pengangkatan melalui prestasi kerja.
4. Disiplin kerja, kesetiaan dan pengabdian kepada negara.

Terdapat kecenderungan, sctiap kali perempuan akan bekerja dan mengembangkan diri serta kariernya pada sektor publik, mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumah tangga. Hal ini berarti apabila perempuan ingin mengembangkan karier atau berkuat pada sektor publik, mereka dituntut untuk tetap dan selalu tidak melupakan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana menurut Dra. Hj. Purmiasih MM, dalam Bhirawa (22 Maret 2006), meskipun sebagai perempuan karier, perempuan sebagai pekerja sekaligus sebagai ibu dan isteri harus pintar-pintar membagi waktu antara kantor dan keluarga. Perempuan sebagai isteri atau ibu harus dapat membagi waktu yang sebaik mungkin antara pekerjaan dan keluarga dikarenakan perempuan memiliki multi-peran. Multi-peran tersebut menurut Suwondo (1984: 21) antara lain:

1. Perempuan sebagai isteri.
2. Perempuan sebagai pendidik dan pembina generasi muda.
3. Perempuan sebagai pengatur rumah tangga.
4. Perempuan sebagai tenaga kerja dalam profesi.

5. Perempuan sebagai anggota organisasi dalam masyarakat.

Seorang isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai keterbatasan dalam mengejar kariernya bila dibandingkan dengan seorang laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama dikarenakan perempuan memiliki peran ganda, dimana perempuan selain mencari nafkah ia juga harus memberikan waktunya untuk keluarga yang tidak kalah pentingnya. Untuk itu muncul pandangan bahwa dalam mengatur waktu dan tenaga bagi isteri yang berperan ganda memang seharusnya dapat dilakukan. Karena dengan dapat mengatur waktu dan tenaga untuk kerja dan untuk keluarga akan meringankan pekerjaan rumah tangga disamping menciptakan suasana yang rukun. Dengan suasana kebersamaan anggota keluarga akan mudah menguatkan kedekatan hubungan anggota keluarga.

Mengingat tugas sebagai ibu rumah tangga yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan juga mengerjakan tugas dari tempatnya bekerja adalah bukan merupakan suatu hal yang ringan. Nampaknya dalam hal ini diperlukan dukungan dan kerja sama dengan anggota keluarga lainnya terutama suami agar isteri dapat menjalankan tugasnya di tempat kerja maupun di rumah dengan baik. Karena itulah, tidak cukup apabila para suami yang isterinya bekerja hanya sekedar memberikan ijin tanpa diikuti kerjasama, dukungan dan partisipasinya dalam tugas-tugas isteri. Setidaknya diperlukan pengertian dari suami bahwa isterinya adalah bukan "perempuan super" yang dapat melakukan segala hal (termasuk tugas-tugasnya dalam peran ganda) seorang diri.

Seorang perempuan yang sudah berkeluarga yang juga bekerja di luar rumah akan sulit mempertahankan dan mengembangkan perannya di luar rumah apabila tingkat dukungan sosial yang diperolehnya tidak sepenuhnya. Artinya apabila suami tidak memberikan partisipasi dan dukungan yang menunjang bagi kemajuan karier isteri di tempat kerja (walaupun ia menyetujui isterinya bekerja) maka akan sulit bagi perempuan untuk berusaha memperoleh kemajuan dalam kariernya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa meskipun isteri bekerja di luar rumah tetapi isteri harus tetap menomorsatukan pekerjaan rumah tangga dan keluarga. Padahal untuk menjalankan

peran ganda dengan baik seorang diri bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang isteri.

Kaum laki-laki dan para suami yang tidak memandang penting pembagian kerja secara seksual akan cenderung setuju kalau kaum perempuan dan para isteri ikut berperan dalam sektor publik atau dengan kata lain mempunyai pekerjaan yang tetap di luar rumah. Fenomena seperti ini, sekarang (pada era modernisasi) sudah banyak ditemui yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah isteri yang bekerja di luar rumah, yang ikut membantu suami dalam pembiayaan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.

Untuk melihat peran ganda isteri, penulis akan mengemukakan konsep kesetaraan (*equality*) atau kemitra-sejajaran antara perempuan dan laki-laki. Dalam hubungan ini peran-peran perempuan tercakup dalam lingkup keluarga, dimana keluarga merupakan unit sosial yang ideal yang dapat dipakai sebagai wadah bagi kesejahteraan anggotanya dan pengembangan kemitraan antara suami isteri dalam lembaga keluarga menjadi penting. Sehingga diperlukan pengembangan rasa menghargai harkat masing-masing anggota keluarga. Akan tetapi dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Irwanto (dalam Darma, 1998: 26) bahwa:

“Persoalan kemitraan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilepaskan dari persoalan asal muasal perilaku yang bersifat *gender typed*. Dimana perilaku individu ditentukan oleh struktur biologisnya (yang pada gilirannya menentukan kepribadian tertentu), atau orang lain (dididik atau diajar menjadi laki-laki atau perempuan), atau jalannya searah (perubahan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh perkembangan masyarakat pada kurun waktu tertentu)”.

Berperan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan berarti bahwa perempuan telah dapat mengejar berbagai ketertinggalannya dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan. Bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra sejajar dalam pembangunan harus terwujud dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang

ditandai dengan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, dan saling membantu.

Dalam kaitannya dengan peran ganda, seorang isteri yang juga berperan publik masih dapat memperhatikan peran domestiknya. Pada kemitraan dalam keluarga dimana isteri berperan ganda perlu adanya saling menghargai, mengerti dan saling membantu antara suami dan isteri. Seperti yang dikemukakan oleh Irwanto (1993: 83) bahwa:

“Pengembangan karier oleh isteri yang bekerja mempunyai dampak positif pada harga diri perempuan, tetapi jika suami masih mempunyai ideologi tradisionalisme dalam menyelenggarakan hidup berkeluarga (tidak menghargai atau tidak pernah membantu mengurus pekerjaan rumah tangga), maka karier isteri di luar rumah tidak berdampak positif pada kesehatan mental perempuan”.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kemitraan yang sejajar antara suami dan isteri perlu lebih ditekankan secara fungsional. Sebaliknya apabila kemitraan diatur berdasarkan norma budaya yang bersifat gender, dikhawatirkan salah satunya tidak memberdayakan sumber daya secara maksimal. Oleh karena itu, dalam hubungan kemitraan, pembagian kerja domestik hendaknya dilakukan menurut kebutuhan yaitu siapa yang mempunyai waktu luang dan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, daripada berdasarkan atas stereotip laki-laki atau perempuan. Sehingga dalam membangun kemitraan atau kesetaraan dalam keluarga perlu menghargai eksistensi anggotanya, yang meskipun keduanya (suami isteri) saling tergantung satu sama lainnya, hendaknya tetap menghormati, mengerti, menghargai hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Istilah kemitrasejajaran tidak hanya diperlukan di dalam lingkup publik saja melainkan di dalam lingkup domestik. Kemitrasejajaran dalam lingkup domestik, dikatakan oleh Wijaya (1995: 85) bahwa, “Pada kemitraan antara suami isteri yang sejajar, maka keduanya berada pada status yang sama”. Status yang sama membawa harkat dan martabat kemanusiaan yang sama pula. Bila suami sejajar dengan isteri, keduanya akan saling membagi rasa, membagi nasib, saling menghormati sebagai

sesama manusia, saling peduli serta saling membahagiakan. Sehingga dengan demikian tidak ada hubungan-hubungan yang tidak seimbang, seperti suami penguasa-isteri pelaksana, suami dilayani-isteri melayani, suami diabdikan-isteri mengabdikan, suami mandiri-isteri tergantung, suami memerintah-isteri diprintah, dan suami orang kantoran-isteri orang rumahan.

Sedangkan kemitrasejajaran dalam lingkup publik, menurut Wijaya (1995: 86) yakni kemitrasejajaran dipersepsikan sebagai persamaan derajat, persamaan status antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya dapat diasosiasikan dengan posisi tawar-menawar yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya berhak pada posisi pengambilan keputusan, memperoleh berbagai kesempatan untuk beraktualisasi diri, memperoleh akses pada sumber daya serta menikmati berbagai hasil pembangunan. Sehingga akan menghapus stereotip laki-laki dan perempuan, kerja khas antara laki-laki dan perempuan, kondisi yang berlaku sepihak bagi jenis kelamin tertentu, ukuran kepantasan tertentu bagi laki-laki dan perempuan, perbedaan peran gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian kedudukan yang sejajar sebagai partner yang memungkinkan persamaan laki-laki dan perempuan akan mewujudkan keadaan dimana individu berpartisipasi dalam kehidupan publik tidak dibatasi oleh pranata gender.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 114) kemitraan mengandung arti jalinan kerja sama. Maka kemitraan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga merupakan jalinan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Pengertian tentang kemitraan antara laki-laki dan perempuan ditegaskan pula sebagai berikut:

1. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memperhatikan persamaan derajat dan status dalam kebersamaan dan saling pengertian. Keduanya berhak dalam posisi mengambil keputusan, memperoleh kesempatan untuk beraktualisasi, memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber dan manfaat pembangunan

2. Hubungan sosial setara yang saling melengkapi dan menghargai antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan persamaan hak, kewajiban dan kesempatan dengan memperhatikan perbedaan biologis yang membawa konsekuensi perbedaan kebutuhan dan permasalahan dimana laki-laki dan perempuan dapat beraktualisasi diri sepenuhnya.
3. Dalam isu lingkungan hidup, pengertian kemitraan adalah kepedulian dan kerja sama laki-laki dan perempuan dalam menghadapi masalah lingkungan.

Berperan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan berarti bahwa perempuan dapat mengejar berbagai ketertinggalannya dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan. Bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam pembangunan harus terwujud dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, dan saling membantu.

Dalam pelaksanaan kemitraan antara suami isteri bukanlah hal yang mudah karena adanya internalisasi pada individu yang cukup kuat dalam kebudayaannya dan karena dalam hubungan kemitrasejajaran yang secara faktual suami bersifat superior dan isteri adalah inferior sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Menurut Tinker yang dikutip oleh Wijaya (1995: 82) salah satu penyebab sulitnya penghapusan terhadap ketidaksejajaran (*inequality*) adalah struktur patriarkhi.

Perempuan yang menjadi korban budaya patriarkhi hanya diberi kesempatan bekerja yang masih berdasarkan seks atau pembagian kerja seksual. Dan kesempatan kerja yang terbatas pun masih di bawah perlakuan dominasi, seperti ijin dari ayah atau suami.

Konstruksi sosial yang berasal dari kekuasaan patriarkhi mengakibatkan struktur sosial yang tidak adil dan bersifat tidak setara diantara mayoritas (laki-laki) dan minoritas (perempuan) dalam konteks ras, agama, nilai kultural, dan kecenderungan seksual. Pengertian mayoritas-minoritas di sini tidak atas jumlah (kuantitas) saja, tetapi dilihat dari kondisi kuat-lemah (kualitas) dari inter-relasi

secara struktural. Jumlah kaum perempuan dalam suatu masyarakat bisa jadi lebih banyak dibanding laki-laki, tetapi posisi perempuan dalam konstruksi sosial menjadi *powerless* akibat nilai yang mendasari peran-peran sosial, karenanya berada pada posisi minoritas.

Dalam konstruksi sosial patriarki, laki-laki memiliki *privelese* peran di ruang publik, sedangkan perempuan ditempatkan pada peran di ruang domestik. Sebagai akibatnya, ketika perempuan memasuki ruang publik, maka jenis pekerjaan dan kegiatannya di masyarakat seringkali merupakan perpanjangan dari peran domestiknya. Misalnya dalam struktur organisasi, perempuan seringkali ditempatkan sebagai sekretaris atau bagian administrasi (bendahara) yang memerlukan ketelitian dan ketelatenan. Sedangkan posisi lainnya seperti ketua tetap diberikan kepada laki-laki, padahal sebenarnya perempuan juga memiliki kemampuan untuk menempati posisi tersebut. Penempatan posisi seperti demikian menunjukkan bahwa dalam masyarakat sampai sekarang pun masih menganut ideologi yang bias gender dan perempuan selalu sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai tenaga kerja nomor dua setelah laki-laki.

Perkembangan modernisasi dan industrialisasi telah membuka peluang-peluang baru dan keahlian-keahlian baru yang memungkinkan perempuan untuk memasukinya. Ada banyak jenis pekerjaan publik yang membutuhkan peran seorang perempuan secara lebih spesifik dan lebih profesional. Pengertian istilah profesional adalah orang yang mendapatkan gaji atau imbalan karena keahliannya. Namun, keberadaan perempuan profesional ini masih saja berada dalam stereotip yang memprihatinkan, lebih-lebih jika perempuan berada pada peran-peran sebagai pembantu. Pembantu dipandang sebagai peran yang berada di belakang majikan atau penguasa. Dengan kata lain pembantu adalah sebagai orang yang dikuasai oleh penguasanya. Akan tetapi lain halnya dengan istilah pembantu yang dipakai pada peran sekretaris, perawat ataupun peran yang berlabel karier. Tugas seorang sekretaris atau profesi sejenis lainnya yang dijalankan oleh perempuan adalah tugas seorang ahli, tetapi bukan berarti tugas seorang pembantu rumah tangga misalnya,

bukan tugas seorang ahli melainkan pada profesi sekretaris ataupun perawat memerlukan keahlian tertentu yang belum tentu semua orang bisa. Oleh karena itu, tidak relevan memandang tugas-tugas asistensi tersebut dipandang rendah karena asal mula pekerjaan ini muncul justru karena seseorang atau lembaga tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Namun, dalam konstruksi budaya yang merupakan bentukan manusia itu sendiri, masih menempatkan perempuan profesional tersebut pada posisi yang subordinat. Posisi yang subordinat tersebut adalah tidak lain merupakan sumber dari ketidakadilan gender, dimana laki-laki selalu memimpin dan perempuan dipimpin. Dengan kata lain terdapat hubungan vertikal di dalamnya yakni penguasa dan dikuasai dan hubungan antara keduanya adalah tidak setara. Selain itu, posisi subordinat sarat akan perampasan hak dan martabat. Sebaliknya kedudukan ordinat adalah penguasa dan penentu yang potensial dalam menindas dan merampas hak dan martabat kaum subordinat.

2.1.2 Kendala-Kendala Perempuan Bekerja

Stereotip perempuan modern adalah sosok perempuan yang tidak hanya terlibat dalam sektor domestik saja melainkan pada sektor publik, yakni sebagai perempuan bekerja (karier). Namun, sebagai perempuan karier tidaklah mudah. Banyak kendala-kendala yang mengikat baik secara tidak langsung maupun secara langsung, baik yang berasal dari dalam diri pribadi perempuan itu sendiri maupun kendala yang berasal dari luar. Dapat dijelaskan kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Kultural

Antara konsep masyarakat dan konsep kebudayaan adalah saling terkait meskipun keduanya dapat dipelajari secara terpisah. Masyarakat menunjuk pada hubungan-hubungan yang terpolakan yang dicapai diantara orang-orang. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari hubungan yang terpolakan tersebut (seperti teknologi, kepercayaan, nilai, dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman, sekaligus

sebagai hasil dari hubungan yang terpolakan tersebut). Menurut Gozalba (dalam Asy'ari, 1983: 95) menyatakan bahwa, "Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwitunggal, yakni masyarakat melahirkan kebudayaan dan merupakan perwujudan kebudayaan". Dalam arti bahwa masyarakat yang sekarang ini merupakan hasil dari kebudayaan sebelumnya dan masyarakat dewasa ini pun dapat melahirkan kebudayaan baru.

Dengan demikian, budaya bentukan manusia telah merasuk dalam pola pikir perempuan yang telah dibingkai dengan stereotip yang sama tentang perempuan yaitu sebagai makhluk yang lemah dan di bawah dominasi laki-laki (budaya patriarki).

Pada masyarakat patriarki Indonesia, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan gender, yaitu perbedaan perilaku, peran, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Dalam keluarga Indonesia umumnya, orang tua atau orang-orang terdekat lainnya, secara tidak langsung maupun tidak langsung telah mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuannya secara berbeda. Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja, bahkan seringkali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Anak perempuan sebaliknya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut pengurusan rumah (membersihkan rumah, memasak, mencuci), dan menjaga adik. Hal-hal semacam ini secara tidak sengaja telah mengarahkan anak laki-laki berbeda perannya dengan anak perempuan. Anak perempuan sengaja atau tidak sengaja telah dipersiapkan sebagai ibu rumah tangga, karena dalam masyarakat telah disosialisasikan bahwa setelah menikah, anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, suami dan anak. Sedangkan anak laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban bekerja mencari nafkah.

Adapun sudut pandang tentang perempuan menurut Patria M. L. dan J. N. Brantley (dalam Suyanto, 1996), sebagai berikut:

1. Perempuan memang berbeda dengan laki-laki.

2. Perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki.
3. Perempuan merupakan kelompok yang tertindas oleh laki-laki atau oleh sistem sosial yang bersifat patriarki bentukan laki-laki.

Ketiga sudut pandang di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan memang lemah. Apalagi adanya mitos-mitos seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, kurang produktif, tidak agresif dan emosional yang terkonstruksi melalui keluarga, pendidikan, media massa dan dilegitimasi oleh hukum dan agama sehingga menyebabkan kaum perempuan memercayai dan menerima kondisi dan posisi mereka sebagai hal yang wajar. Contoh yang nyata misalnya mitos tentang anggapan bahwa perempuan sebagai pembantu laki-laki (terlihat dalam pernyataan politik pemerintah yang memosisikan laki-laki selalu sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pembantu laki-laki). Selain itu, adanya pernyataan yang merendahkan perempuan seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, kurang produktif, tidak agresif dan emosional dimana mitos-mitos tersebut telah mentradisi pada keluarga dan masyarakat sehingga orang menganggapnya sebagai hal yang wajar.

2. Struktural

Munculnya perempuan yang bekerja di luar rumah adalah suatu fenomena sosial yang sedang menggejala. Sehingga tidak mengherankan banyak perempuan mengejar peran-peran publik yang diinginkan. Menurut Abdullah (1997: 8) banyaknya orientasi perempuan berperan dalam dunia publik dikarenakan adanya struktur sosial yang timpang, yaitu dikotomi domestik-publik yang menyatakan bahwa perempuan terpenjara dalam bidang domestik, sementara laki-laki dengan bebas terlibat dalam bidang publik. Keadaan demikian tidak memberikan basis penting bagi tawar menawar kekuasaan tentang stratifikasi bidang kegiatan, dimana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada domestik.

Perbedaan keahlian yang dibawa laki-laki dan perempuan ke pasar menyebabkan adanya perbedaan upah diantara keduanya. Perbedaan upah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor misalnya pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja,

serta kondisi-kondisi kerja lainnya (seperti cuti hamil atau perpindahan pegawai). Upah tersebut merupakan indikator sumbangan-sumbangan produktif (nilai tukar). "Wanita dengan demikian kalah dalam kompetisi dengan laki-laki ... [sebab] sosialisasi jenis kelamin yang berbeda berfungsi memproduksi ketidaksetaraan, karena kegagalannya mempersenjatai wanita dengan karakteristik personal yang dibutuhkan untuk keberhasilan kompetisi dengan laki-laki di pasar tenaga kerja" (Chafetz, dalam Ollenburger and Moore, 2002: 100).

3. Personal

Selain faktor pendorong dari luar yang dapat menyebabkan ruang gerak perempuan semakin sempit, terdapat faktor utama yang lebih berpengaruh yaitu faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pribadi perempuan antara lain:

- a. Kesulitan perempuan untuk menghilangkan perasaan malu dan takut salah yang merupakan bentukan budaya sehingga perempuan sulit menentukan identitas dirinya sebagai pribadi.
- b. Kurang mampu berpikir jernih dan tajam karena adanya pandangan stereotip yang telah terinternalisasi sehingga perempuan seringkali diabaikan dan ditinggal dalam pengambilan keputusan.
- c. Sikap yang tertutup dan rendah diri yang berlebihan.
- d. Kurang menyadari kekuatan perempuan sebagai kelompok yang sebenarnya dapat membuat gerakan-gerakan perubahan dalam masyarakat.

4. Teologis

Pada kebanyakan masyarakat Jawa yang memeluk agama Islam, sejak awal seorang anak sudah diperkenalkan dengan norma-norma pembagian peran dalam rumah tangga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban melayani kebutuhan konsumsi keluarga dan mengasuh anak. Perempuan dianggap tidak boleh menjadi kepala keluarga, terutama untuk fungsi pengatur dan 'hakim'. Sedangkan laki-laki mempunyai kewajiban sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pelindung, 'hakim', dan pengatur dalam keluarga. Laki-laki selama masih ada istrinya, tidak

boleh terlalu terlibat dengan tugas-tugas kescharian rumah tangga yang bisa mengakibatkan martabatnya turun.

Dalam ajaran Islam juga diperkenalkan norma-norma tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Suami berkewajiban memimpin isteri, menafkahi keluarga, melindungi keluarga dari api neraka, dan memperlakukan isteri dengan baik. Sedangkan isteri berkewajiban menjadi isteri yang saleh, mengerjakan tugas rumah tangga, dan tidak boleh mencari peran di luar rumah tanpa seijin suami.

Pada pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa posisi kaum perempuan atau isteri adalah harus di bawah laki-laki atau suami dan tidak boleh bekerja di luar rumah serta harus mematuhi perintah suami sebagaimana yang dijelaskan oleh perintah agama.

Beberapa faktor penghambat di atas hendaknya tidak hanya sekedar diketahui oleh kaum perempuan, tetapi diperlukan adanya sikap responsif terhadap permasalahan yang ada. Sehingga perempuan tidak dianggap sebagai makhluk yang serba menerima (pasrah) segala keadaan bentukan budaya patriarki. Oleh karena itu, perempuan harus menyadari segala masalah yang ada dalam dirinya dan segera mencari jalan keluar serta membuktikan bahwa perempuan juga bisa sebagai mitra sejajar dengan laki-laki di dalam segala bidang pembangunan bahkan bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik.

2.1.3 Kesetaraan Gender: Sebuah Refleksi Emansipasi Perempuan

Karena berada pada kelompok yang merasa selalu dirugikan, kaum perempuan ingin sejajar dengan kaum laki-laki dalam pergaulan dan status sosial. Namun, apakah itu yang disebut dengan emansipasi perempuan? Menurut Emile Durkheim (dalam Suyanto & Hendrarso, 1996: 174), bahwa bersatunya laki-laki dan perempuan yang kemudian memainkan peranan sebagai suami dan istri, bukan karena prinsip persamaan, tetapi justru karena mereka berbeda satu sama lain, dan karena perbedaan itu mereka dapat bersatu membangun rumah tangga. Jadi, makna emansipasi di sini adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan, peran

dan fungsi obyektif masing-masing. Sedangkan menurut Sajogyo (1983) menyatakan bahwa, "Emansipasi adalah suatu usaha melepaskan diri dari peranan yang terbatas dalam sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru sesuai dengan jaman baru dalam keluarga maupun dalam masyarakat besar".

Dengan kata lain, kata emansipasi berarti suatu gerakan yang mencita-citakan kehidupan setara (*equal*) antara perempuan dan laki-laki, yakni perjuangan perempuan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun, sering dianggap bahwa emansipasi merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dan kodrat perempuan itu sendiri.

Dengan kata lain, emansipasi perempuan adalah suatu usaha untuk mempersamakan hak perempuan dengan laki-laki di segala bidang. Istilah "emansipasi" yang dimaksud adalah "kemerdekaan, pembebasan" dari kekangan. Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan bermula pada abad ke-19 dan mencapai hasilnya pada abad ke-20. Gerakan untuk menuntut persamaan hak pertama kali terjadi di negara-negara industri yaitu Amerika dan Eropa Barat yang dikenal dengan sebutan "women's liberation" (women's lib) dan diakui keabsahannya pada pertengahan tahun 1960-an dengan diproklamákannya Tahun Internasional Wanita oleh PBB pada tahun 1975. Sejak itulah kajian tentang perempuan berkembang pesat. Sudah terlihat gejala bahwa sebagian kaum perempuan Indonesia tidak puas lagi dengan peranan sebagai isteri dan ibu rumah tangga saja. Oleh karena itu, kaum perempuan mulai bangkit dan mempergunakan kesempatan untuk ikut aktif dalam kegiatan publik.

Bentuk nyata emansipasi di sini adalah keikutsertaan kaum perempuan memasuki bidang publik atau bekerja. Perempuan bekerja di sektor publik karena sebagai pribadi manusia mereka membutuhkan aktualisasi diri. Di samping itu, mereka merupakan tenaga yang produktif. Tetapi akibat ideologi gender yang patriarkhis membuat perempuan tidak bisa melepaskan kegiatannya di sektor domestik. Akibatnya perempuan terbebani pekerjaan ganda. Namun dalam

kenyataannya, pekerjaan perempuan dalam sektor domestik tidak dihargai bahkan mereka tidak diakui sebagai tenaga kerja yang produktif.

Tidak perlu lagi mempertahankan pandangan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, sebaliknya laki-laki sebagai sosok yang kuat dan dominan dalam segala bidang kehidupan. Memang harus diakui dalam masyarakat masih terdapat nilai-nilai sosial budaya yang belum siap menerima pergeseran nilai perubahan sosok perempuan masa kini. Namun apabila perempuan tetap menganut pandangan tersebut, bagaimana dengan perubahan yang mereka inginkan? Misalnya kesetaraan gender dan persamaan hak dengan laki-laki. Sebagaimana dalam GBHN 1993, bahwa perempuan dan laki-laki sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang.

Sebenarnya sejarah keterbelakangan perempuan disebabkan oleh tidak adanya kesempatan untuk bersekolah. Jadi, tingkat pendidikan sangat menentukan kedudukan perempuan dan laki-laki. Melalui pendidikan perempuan dapat memiliki kemampuan yang setara bahkan melebihi laki-laki.

Melalui pendidikan yang membebaskan, Paulo Freire (dalam Murniati, 2004: 95) mengatakan bahwa, "Manusia dapat merasa sebagai pemimpin bagi pemikirannya sendiri. Setiap manusia memiliki kekuatan yang ada dalam dirinya (*power to*), jika bersatu maka akan melahirkan kekuatan kolektif (*power with*) yang kemudian akan terbentuk *power within*, yaitu kekuatan batin, spirit yang membuat manusia bersemangat untuk mencari kebebasan". Jadi yang diperlukan dalam menghapuskan ketidakadilan gender adalah gerakan aktif tanpa kekerasan dan tanpa bias gender oleh kekuatan kolektif perempuan.

Perempuan seharusnya sudah dipahami sebagai manusia utuh dan berperan sebagai mitra sejajar yang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan politik. Persoalan perempuan sudah tidak perlu dibedakan lagi dengan persoalan laki-laki. Keduanya adalah sama. Namun, konstruksi budaya telah menempatkan keduanya adalah berbeda. Oleh karena itu, perempuan dalam berkarier tidak perlu terus

menoleh ke belakang namun justru harus terus maju untuk memburu tugas memimpin. Perempuan harus benar-benar mewujudkan diri sebagai mitra sejajar laki-laki.

2.1.4 Feminisme: Sebuah Perspektif Perempuan

Sampai sekarang masih terdapat kekaburan makna antara gender dan seks. Keduanya sama-sama dimaknai sebagai jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi, perlu ditekankan diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat menyolok. Seks didapatkan manusia secara alamiah (pemberian Tuhan atau *nature*), Sedangkan gender muncul melalui kebudayaan (*nurture*). Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai perbedaan dan persamaan yang alamiah (*nature*) dan berdasarkan kebudayaan (*nurture*). Dapat dijelaskan kembali bahwa seks adalah jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) sedangkan gender merupakan peran yang pantas bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya. Melalui sosialisasi ideologi gender terbentuk serta membedakan perempuan dan laki-laki atas dasar kepantasannya. Ideologi ini membentuk konstruksi sosial yang melembaga dan menghasilkan pandangan stereotip sesuai label yang diberikan pada perempuan dan laki-laki. Adanya perbedaan gender ternyata memberikan dampak yang tidak adil bagi perempuan. Bentuk dari ketidakadilan gender tersebut dapat berupa marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.

1. Marginalisasi terhadap perempuan.

Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Beberapa contoh seperti di bawah ini:

a. Marginalisasi dalam Negara.

Pada kenyataannya, pemimpin birokrasi tidak pernah diberikan kepada perempuan, meskipun secara teori pimpinan birokrasi dapat dijabat oleh perempuan. Akibatnya terjadilah proses domestifikasi, sehingga perempuan di sektor publik dianggap suatu penyimpangan, sekedar mencari penghasilan tambahan. Selain itu, marginalisasi juga menyebabkan perempuan dijadikan sekedar obyek, seperti pada program pemerintah yang menjadikan perempuan sebagai obyek utama alat-alat kontrasepsi.

b. Marginalisasi dalam Masyarakat.

Dalam proses pembangunan, perempuan sering diikutsertakan tetapi tidak pernah diajak turut mengambil keputusan. Pendapat perempuan jarang didengarkan dan perempuan hanya diberi tugas menjalankan pekerjaan hasil keputusan laki-laki.

c. Marginalisasi dalam Tempat Bekerja.

Penerimaan pekerja dalam suatu lembaga atau organisasi diutamakan untuk laki-laki dengan alasan perempuan kurang produktif (misalnya karena cuti hamil). Apabila ada lowongan jabatan pimpinan, pihak laki-laki yang mendapat prioritas, sementara perempuan disingkirkan sekalipun ia mampu melaksanakannya.

d. Marginalisasi dalam Keluarga.

Perempuan tidak boleh memimpin dan memerintah suami, sekalipun suami tidak bisa memimpin. Dalam kehidupan keluarga, prioritas laki-laki mendapat makan adalah utama, meskipun perempuan yang menyediakannya. Perempuan pula yang membereskan semua, seperti membereskan meja makan dan mencuci piring.

e. Marginalisasi dalam Diri Pribadi.

Dalam diri perempuan sendiri, ada perasaan tidak mampu, lemah, menyingkirkan diri sendiri karena tidak percaya diri.

2. Stereotip Masyarakat terhadap Perempuan.

Pandangan stereotip masyarakat yaitu pengakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Sifat perempuan dan laki-laki telah dibakukan dalam kotak

stereotip yang berbeda sehingga tidak bisa keluar dari kotak stereotip tersebut. Stereotip-stereotip tersebut dapat berupa:

a. Stereotip dalam Negara.

Dalam era Orde Baru, stereotip perempuan menyiratkan sebagai pribadi yang lemah. Terlihat dalam jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Jabatan-jabatan tersebut diberikan kepada perempuan berdasarkan kepantasannya seperti jabatan Menteri Urusan Peranan Wanita.

b. Stereotip dalam Masyarakat.

Perempuan yang membawa tas pakaian masuk ke hotel, diberi label sebagai "perempuan nakal", banyak mata melihatnya curiga. Perempuan digoda, dilecehkan apabila berjalan sendiri di malam hari, dan sebagainya.

c. Stereotip dalam Keluarga.

Urusan rumah tangga diserahkan kepada istri dan anak perempuan. Pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab ibu. Pemulihan energi suami yang bekerja untuk majikannya, diserahkan kepada istrinya dan tanpa upah.

d. Stereotip terhadap Diri Sendiri.

Perempuan selalu memilih pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan yang sudah dibagikan berdasarkan seks tanpa memperdulikan kemampuan yang dimiliki.

3. Subordinasi terhadap Perempuan.

Pandangan yang memposisikan perempuan dengan segala potensinya lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dipandang kurang mampu, sehingga diberi tugas yang ringan dan mudah. Bagi laki-laki, pandangan ini menyebabkan mereka sah untuk tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk muncul sebagai pribadi yang utuh. Laki-laki menganggap perempuan tidak mampu berpikir seperti ukuran mereka. Mereka khawatir apabila pekerjaan yang berat dan penting ditangani oleh perempuan.

4. Beban Ganda terhadap Perempuan.

Perempuan yang bekerja di sektor publik masih memiliki tugas di dalam rumah tangga. Padahal secara ekonomis, mereka tidak mampu menyerahkan tugas tersebut kepada pembantu rumah tangga, yang juga perempuan.

5. Kekerasan terhadap Perempuan.

Stereotip laki-laki atas perempuan bisa berarti kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Kekuasaan ini terungkap dalam wujud kekerasan fisik, psikis, baik verbal maupun nonverbal. Sebagai contoh pelecehan seksual dengan kekerasan fisik terhadap perempuan, pemenjaraan anak perempuan dalam keluarga, *incest*, penganiayaan anak perempuan, pemukulan istri oleh suami, senda gurau yang melecehkan seks perempuan, serta ancaman seks lainnya.

Akibat ketidakadilan dalam struktur sosial ini kemudian melahirkan gerakan emansipatoris yang disebut gerakan feminisme. Aliran ini mempersoalkan ketidakadilan gender melalui analisis di berbagai bidang kehidupan secara kritis. Sebagaimana menurut Fakih (1996: 6), "Feminisme adalah gerakan yang pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut". Meskipun terjadi perbedaan antar feminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi namun mereka sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi keamanan, martabat, dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah.

Feminisme lahir di Barat pada pertengahan abad 17 sebagai reaksi atas terjadinya ketidakadilan berdasarkan gender yang cenderung merugikan perempuan. Sebagai gerakan moral, para pemikir yang memiliki kepedulian terhadap nasib perempuan (selanjutnya disebut sebagai feminis) mencoba mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai permasalahan yang dialami yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan atau opresi pada perempuan serta mencari solusi dan strategi untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan.

Bertitik tolak dari stereotip gender, teori-teori feminis pada intinya menganggap bahwa kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan faktor budaya masyarakat. Sistem patriarki perlu ditinjau karena merugikan perempuan. Adanya ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan telah banyak mengundang gerakan feminis yang selalu memperjuangkan eksistensi dan posisi perempuan dalam lingkup rumah tangga. Gerakan feminisme telah banyak membuktikan dan paling tidak menyumbangkan pikiran, atau inspirasi gagasan bahkan pemahaman terhadap terciptanya dunia yang lebih baik dan lebih adil.

Gerakan feminisme tidak hanya mempengaruhi lembaga-lembaga birokrasi, teori-teori baru ilmu sosial dan penelitian sosial. Lebih dari itu mereka mempengaruhi pandangan berbagai agama. Fenomena sosial semacam ini telah memaksa kaum agamawan untuk melihat dan mengevaluasi kembali terhadap tafsiran terhadap posisi perempuan yang selama ini ada. Gerakan feminis juga yang mendorong munculnya gugatan terhadap berbagai kultur dan tradisi yang mempengaruhi kondisi dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga.

Untuk membahas masalah perempuan, teori-teori feminis adalah perspektif yang berusaha mendeskripsikan keterbelakangan atau opresi yang dialami oleh perempuan dan menjelaskan sebab-sebabnya, apa saja konsekuensi dari keterbelakangan atau opresi tersebut, serta mengemukakan suatu strategi untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan itu. Namun, masing-masing perspektif ini menjawab permasalahan perempuan hanya sebagian dan sementara saja, sesuai dengan kelemahan dan kelebihan metodologi yang dimilikinya (Tong, dalam Ibrahim, 1995: 85). Perspektif feminis tersebut antara lain adalah Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis, dan Feminisme Psikoanalisa. Yang menjadi inti perjuangan semua aliran feminisme tersebut adalah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh kalangan feminis ini dianggap

kurang realistis karena tidak didukung oleh kekuatan politik yang didominasi laki-laki. Teori-teori feminis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal pertama kali dirumuskan oleh Marry Wollstonecraft (1759-1799) dalam tulisannya *A Vindication of the Rights of Women* (Feminis liberal abad ke-18) dan John Stuart Mill dalam tulisannya *The Subjection of Women* (Feminis Liberal abad ke-19), kemudian Betty Friedan dalam tulisannya *The feminine Mystique* dan *The Second Stage*. Penekanan mereka adalah bahwa subordinasi perempuan berakar dari keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi perempuan untuk masuk ke lingkungan publik.

Masyarakat beranggapan bahwa perempuan karena kondisi alamiah yang dimilikinya, kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik, melihat bahwa struktur sosial yang menciptakan ketidaksamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Menurut pemikiran mereka perubahan harus melalui sistem politik dan sistem hukum formal. Anggapan tersebut disangkal oleh Feminisme Liberal yang mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal tentang hakikat manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia, seperti rasionalitas, yang mempunyai dua aspek yaitu moralitas-pembuat keputusan yang otonom, dan prudentialitas-pemenuh kebutuhan diri sendiri. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan sama, dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.

Dengan kata lain, Feminisme Liberal berpandangan bahwa pangkal terjadinya keterbelakangan dan penindasan pada perempuan muncul karena perempuan tidak dipersiapkan untuk menjalankan hak-hak sebagai makhluk yang rasional sebagaimana laki-laki. Selain itu hukum dan adat juga telah membatasi gerak langkah perempuan untuk masuk ke ranah publik, seperti dalam menikmati pendidikan.

kurang realistis karena tidak didukung oleh kekuatan politik yang didominasi laki-laki. Teori-teori feminis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal pertama kali dirumuskan oleh Marry Wollstonecraft (1759-1799) dalam tulisannya *A Vindication of the Rights of Women* (Feminis liberal abad ke-18) dan John Stuart Mill dalam tulisannya *The Subjection of Women* (Feminis Liberal abad ke-19), kemudian Betty Friedan dalam tulisannya *The feminine Mystique* dan *The Second Stage*. Penekanan mereka adalah bahwa subordinasi perempuan berakar dari keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi perempuan untuk masuk ke lingkungan publik.

Masyarakat beranggapan bahwa perempuan karena kondisi alamiah yang dimilikinya, kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik, melihat bahwa struktur sosial yang menciptakan ketidaksamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Menurut pemikiran mereka perubahan harus melalui sistem politik dan sistem hukum formal. Anggapan tersebut disangkal oleh Feminisme Liberal yang mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal tentang hakikat manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia, seperti rasionalitas, yang mempunyai dua aspek yaitu moralitas-pembuat keputusan yang otonom, dan prudentialitas-pemenuh kebutuhan diri sendiri. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan sama, dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.

Dengan kata lain, Feminisme Liberal berpandangan bahwa pangkal terjadinya keterbelakangan dan penindasan pada perempuan muncul karena perempuan tidak dipersiapkan untuk menjalankan hak-hak sebagai makhluk yang rasional sebagaimana laki-laki. Selain itu hukum dan adat juga telah membatasi gerak langkah perempuan untuk masuk ke ranah publik, seperti dalam menikmati pendidikan.

Pembatasan tersebut menyebabkan intelektualitas perempuan tidak berkembang sehingga menjadi terbelakang.

Sebagai jalan keluar, Feminis liberal mengupayakan adanya perubahan pada ketentuan hukum dan adat istiadat yang membelenggu perempuan sehingga nantinya perempuan dapat terjun dalam bidang pendidikan, kerja, dan politik (Wollstonecraft, Mill, dan Friedan, dalam Ihromi, 1995).

2. Feminisme Marxis

Sebagai reaksi terhadap pemikiran Feminis Liberal tentang bagaimana meningkatkan status dan peranan perempuan, Feminis Marxis yang dilandasi oleh pemikiran Marx dan Engels berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan kapitalisme. Menurut mereka, perempuan tidak mungkin dapat kesempatan yang sama seperti laki-laki apabila mereka masih berada dalam masyarakat yang berkelas. Feminis Marxis berusaha menunjukkan bahwa perjuangan gender dan kelas adalah dua hal yang saling berhubungan.

Menurut perspektif ini, perempuan merupakan "kelas sosial" tersendiri karena pekerjaan yang mereka lakukan, apakah mereka itu isteri, anak perempuan, keponakan perempuan, adik perempuan dari kelas borjuis, atautkah mereka itu isteri, anak perempuan, keponakan perempuan, adik perempuan dari laki-laki kelas proletar, adalah sama yaitu pekerjaan rumah tangga. Dalam masyarakat berkelas, subordinasi dan opresi tidak hanya terjadi dari laki-laki terhadap perempuan tetapi mungkin juga terjadi dari perempuan terhadap perempuan yang berasal dari kelas yang berbeda.

Fokus kajian Feminis Marxis adalah hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan perempuan, bagaimana pranata keluarga dikaitkan dengan sistem kapitalisme, bagaimana pekerjaan perempuan dalam mengurus rumah tangga tidak dianggap penting dan dianggap bukan pekerjaan, bagaimana perempuan itu jika terjun dalam pasar tenaga kerja diberi pekerjaan yang membosankan dan memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Jalan keluar yang diajukan oleh Feminis Marxis untuk membebaskan perempuan dari subordinasi dan opresi adalah dengan menghapus sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem sosialisme karena menurut Feminis Marxis subordinasi perempuan sebenarnya tidak disebabkan oleh individu secara sengaja tetapi akibat adanya struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme.

3. Feminisme Radikal

Feminis Radikal memfokuskan perhatiannya kepada permasalahan perempuan yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan seksualitas perempuan. Asumsi dasar perspektif ini adalah patriarki (*patriarchy*), yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan keterbelakangan perempuan. Konsep patriarki diangkat oleh Max Weber untuk menjelaskan bentuk organisasi rumah tangga dimana ayah sebagai tokoh yang dominan dalam rumah tangga dan menguasai anggota rumah tangga (perempuan dan laki-laki) dan juga menguasai produksi rumah tangga.

Di dalam sistem yang ditandai oleh kekuasaan, dominasi, hierarki, dan kompetisi ini tidak hanya berlaku di dalam struktur hukum, politik, dan ekonomi saja tetapi juga di dalam institusi sosial dan budaya. Menurut Firestone (dalam Ihromi, 1995), patriarki berakar dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sehingga meskipun kesetaraan pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik telah dicapai oleh perempuan, perubahan mendasar pada kehidupan perempuan tidak akan tercapai apabila masalah reproduksi biologis masih tetap dipertahankan. Sementara itu, Millett (dalam Ihromi, 1995) mengemukakan bahwa ideologi patriarki telah membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan serta meyakinkan bahwa laki-laki adalah pihak yang dominan, unggul, dan berperan maskulin, sedangkan perempuan adalah pihak yang subordinat dan berperan feminin. Laki-laki berkuasa atas perempuan sehingga laki-laki dibenarkan menguasai seksualitas perempuan. Seksualitas perempuan hanya untuk kepuasan laki-laki oleh karena itu perempuan tidak mempunyai hak atas seksualitasnya sendiri serta merasa inferior terhadap laki-

laki. Ideologi ini sangat berpengaruh karena disosialisasikan sejak usia dini melalui institusi sosial di masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.

Karena kedominanan laki-laki dan kepatuhan perempuan adalah norma dalam sesuatu sebagaimana sangat mendasar dalam hal seksualitas, kedominanan laki-laki dan kepatuhan perempuan menjadi norma pula dalam konteks lainnya. Feminis Radikal berpendapat bahwa perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki di bidang apapun (politik, sosial, ekonomi), kecuali hubungan heteroseksual tersebut benar-benar egalitarian, suatu keadaan yang agaknya tidak akan dicapai selama seksualitas perempuan diinterpretasikan sebagai pemenuh kebutuhan seksualitas laki-laki.

Untuk membebaskan perempuan dari subordinasi dan opresi maka ideologi patriarki tidak hanya harus dirombak tetapi harus dicabut sampai akar dan cabangnya. Dengan terhapusnya ideologi tersebut, perempuan akan terbebas dari opresi karena tidak ada lagi pihak yang dominan di antara laki-laki dan perempuan.

4. Feminisme Sosialis

Feminis Sosialis muncul sebagai akibat adanya ketidakpuasan terhadap analisis Feminis Marxis yang buta gender dan sebaliknya Feminis Radikal yang memfokuskan pada gender. Pandangan Feminis Sosialis pada dasarnya merupakan sintesa dari pemikiran dari kedua feminis tersebut, yakni Feminis Marxis dan Feminis Radikal. Feminis Sosialis berasumsi bahwa keterbelakangan perempuan sebagai perempuan bukan hanya karena mereka hidup di dalam masyarakat yang kapitalis, akan tetapi juga dikarenakan mereka hidup di dalam masyarakat yang patriarki (Ihromi, 1995: 105).

Lebih lanjut, menurut Amal (dalam Ihromi, 1995: 106-107) berpendapat bahwa secara garis besar, ada dua pendekatan yang berbeda yang digunakan para feminis untuk melihat permasalahan perempuan, yakni *dual-system theory* dan *unified-system theory*. Teori dual-sistem menjelaskan bahwa patriarki dan kapitalisme adalah bentuk hubungan sosial khusus yang apabila keduanya sama-sama berkembang dan berlaku, maka perempuan akan tertindas lebih buruk lagi. Agar

opresi perempuan dapat dipahami, maka patriarki dan kapitalisme harus dianalisis. Pertama sebagai fenomena yang terpisah dan kedua sebagai fenomena yang secara dialektis saling berhubungan. Kapitalisme merupakan struktur material yang secara historis berakar dalam modus produksi barang (bagaimana kegiatan produksi dilakukan) dan digabungkan dengan teori yang menjelaskan patriarki sebagai struktur material yang secara historis berakar dalam modus produksi seksualitas. Sedangkan, teori unified-system mencoba menganalisis kapitalisme dan patriarki tidak secara terpisah tetapi keduanya dianalisis secara bersama-sama dengan menggunakan satu konsep. Menurut teori ini, masalah kapitalisme dan patriarki tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

5. Aliran Psikoanalisa

Bahwa penindasan terhadap kaum perempuan karena kaum laki-laki memiliki perasaan yang terpendam dalam dirinya untuk menguasai perempuan.

Berbagai aliran feminis di atas adalah mengupas masalah subordinasi atas perempuan oleh laki-laki. Sebenarnya kesadaran akan adanya ketidakadilan terhadap perempuan ini sudah dirasakan sejak lama. Namun, karena terinternalisasinya budaya (adat dan tradisi) dalam pola pikir perempuan membuat situasi dominasi tersebut seolah sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak bisa digoyahkan. Sehingga baik kaum perempuan itu sendiri maupun kaum laki-laki semakin percaya bahwa kaum perempuan adalah pihak yang lemah dan ter subordinasi. Menurut kaum Feminis Sosialis, dalam mencari keadilan dalam arti penyetaraan kedudukan antara kaum perempuan dan laki-laki diperlukan kerja sama diantara keduanya yaitu dengan mengubah struktur hierarki (superior dan inferior). Selain itu, perubahan struktur hanya dapat dilaksanakan melalui perubahan persepsi dan kemauan politik. Karena selama ini kemauan politik didominasi dan dikuasai oleh kaum laki-laki. Seperti terlihat dalam perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada tinjauan penelitian terdahulu, jenis penelitian yang hampir sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Drs. Sumarno (2000) tentang Marginalisasi Pekerja Wanita pada Industri Sandang di Pedesaan yang berlokasi di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa di daerah penelitian tidak ditemui adanya kecenderungan dominasi-subordinasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ketimpangan gender yang nampak adalah adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang harus dikerjakan perempuan dan laki-laki sifatnya hanya membantu saja. Demikian pula sebaliknya, bila perempuan bekerja di sektor publik, maka jenis pekerjaannya dilihat sebagai tambahan (*secondary bread winner*) dan belum diakui sama seperti bila hal tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Drs. Sumarno (2000), pembagian kerja dalam rumah tangga masih menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan biasanya mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan ketelitian dan kesabaran, yaitu memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sementara laki-laki lebih banyak mengerjakan jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik seperti memperbaiki rumah, memelihara ternak, mencari kayu bakar, mengerjakan sawah, dan sebagainya. Konstruksi sosial yang bias gender ini masih berlaku pada sebagian besar masyarakat di Kecamatan Cluring. Meskipun demikian, beberapa contoh jenis pekerjaan yang disebutkan seringkali juga dikerjakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang awalnya sudah menjadi pekerjaan rutinitas laki-laki ataupun perempuan, keduanya bisa melakukan jenis pekerjaan tersebut tidak berdasarkan gender tetapi tergantung pada waktu luang dan siapa yang mampu melakukannya. Hal tersebut dilakukan karena atas dasar bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda dalam hal kemampuan, yang membedakan hanyalah perangkat biologisnya saja.

Masyarakat Kecamatan Cluring masih memberlakukan nilai adat yang mencerminkan ketimpangan kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun demikian, tidak semua nilai adat yang berlaku di daerah penelitian mengindikasikan adanya ketimpangan gender. Beberapa nilai adat masih diterima secara wajar oleh masing-masing kelompok dan tidak terdapat unsur paksaan untuk saling mendominasi. Justru beberapa nilai budaya sebenarnya hanya menunjukkan adanya pembagian peranan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, yang tidak harus diartikan sebagai bentuk ketimpangan gender. Pembagian peran laki-laki dan perempuan tersebut merupakan bentuk egalitarianisme yang diatur dalam norma-norma adat untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Namun, bentuk egalitarianisme yang tersurat dalam penelitian yang peneliti lakukan merupakan bentuk dari pembagian peran yang masih timpang antara perempuan dan laki-laki meskipun tidak secara langsung responden mengatakan demikian.

Keikutsertaan perempuan atau isteri untuk terjun ke dalam sektor publik memberi dampak terhadap keharmonisan keluarganya secara tidak langsung. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari semua anggota keluarga khususnya partisipasi suami dalam menuntaskan pekerjaan domestik isteri sehingga beban pekerjaan yang dipikul isteri tidak terlalu berat dikarenakan memiliki beban ganda yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Munik'ah (2005), bahwa seorang isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai keterbatasan dalam mengejar kariernya dibandingkan dengan seorang laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama. Sehingga tidaklah cukup apabila para suami yang isterinya bekerja hanya sekedar memberikan izin tanpa diikuti kerjasama, dukungan dan partisipasinya dalam tugas-tugas isteri. Setidaknya diperlukan suatu pengertian dari suami bahwa isterinya bukanlah "perempuan super" yang mampu melakukan segala hal seorang diri.

Partisipasi tersebut akan menolong isteri dalam mensukseskan karier isteri tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang baik. Dengan kata lain, walaupun seorang isteri yang bekerja di luar rumah atau berkarier dan

kemudian memiliki penghasilan sendiri tidak boleh melepaskan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Mereka harus pandai-pandai berperan ganda. Namun, hal tersebut memerlukan dukungan dan partisipasi dari suami karena apabila suami tidak memberikan dukungan dan partisipasi yang menunjang bagi kemajuan karier isteri di tempat kerja maka akan sulit bagi perempuan untuk berusaha memperoleh kemajuan dalam kariernya. Akan tetapi dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, sebagian besar responden masih memegang adat dengan kuat sehingga adanya partisipasi suami dalam menyelesaikan pekerjaan kerumahtanggaan masih dilakukan hanya bersifat membantu bukanlah suatu kewajiban sebagaimana isteri melakukannya.

Masuknya perempuan atau isteri ke dalam pasar tenaga kerja publik disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah karena tuntutan ekonomi. Dengan kata lain, ketika penghasilan keluarga tidak memadai lagi maka bisa saja isteri mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di luar rumah. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Abdullah (1997) bahwa, "Pergeseran peran perempuan dari domestik ke publik merupakan peristiwa penting dari perkembangan realitas ekonomi, sosial dan politik perempuan. Kesadaran perempuan semakin meningkat terhadap peran non domestik, ...". Namun, pada penelitian yang peneliti lakukan bahwa keterlibatan perempuan dalam peran non domestik tersebut bukan sekedar dihabiskan untuk mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki semata, tetapi untuk lebih dapat melakukan perannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun pemerintah dengan menerapkan kemampuan atau keahlian yang ia miliki pada suatu bidang pekerjaan.

BAB 4. KESIMPULAN



4.1 Kesimpulan

Konsep perempuan dihubungkan dengan konsep nature dan nurture. Perempuan diibaratkan sebagai alam (nature) yang harus ditundukkan supaya berbudaya (nurture). Sehingga seolah-olah perempuan harus keluar dari bidang domestik dan masuk ke wilayah publik dimana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada bidang domestik. Hal tersebut melahirkan stratifikasi kekuasaan yang menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang termarginalkan.

Dalam penelitian ini, secara *job description* di tempat kerja tidak didapati adanya diskriminasi peran antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan karena tugas-tugas yang dikerjakan oleh keduanya adalah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing jenis kelamin. Adanya diskriminasi adalah dikarenakan oleh persepsi perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan adalah makhluk lemah ataupun sebagai *the second sex*, selain itu adanya konstruksi budaya yang menempatkan perempuan sebagai *the secondary bread winner* sehingga ketika perempuan memasuki bidang yang biasanya untuk laki-laki (wilayah publik) tidak dapat beraktivitas secara maksimal yang dikarenakan oleh persepsi tersebut di atas.

Jadi dari wilayah penelitian yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis perempuan tidak mengalami diskriminasi peran dalam wilayah publik melainkan terjadi diskriminasi peran dalam wilayah domestik yang dikarenakan oleh persepsi perempuan itu sendiri sebagai *the secondary bread winner* maupun sebagai *the second sex* yang lebih merupakan konstruk budaya sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas manusia. Sehingga ketika perempuan memasuki wilayah publik, perempuan tidak bisa bekerja secara maksimal sebagaimana laki-laki dapat berperan dalam wilayah publik.

4.2 Saran

Keinginan untuk memiliki kedudukan (status) yang sama dengan laki-laki, lebih khusus lagi tidak terdapatnya diskriminasi gender antara keduanya, tidak akan tercapai apabila keduanya tidak menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat berupa saling pengertian, saling mengakui dan saling menghargai status dan keberadaan antara keduanya. Sehingga kerja sama yang saling menguntungkan tersebut dapat menempatkan keduanya pada posisi yang tidak berat sebelah. Kemudian mengenai karakteristik perempuan yang dicitrakan sebagai tidak kompeten, lemah, tidak mandiri, dan anggapan sebagai *the second sex* maupun sebagai *the secondary bread winner* yang lebih merupakan konstruk budaya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang inteligen, mandiri, sukses, etis, dan ciri lain yang positif tentang perempuan. Gambaran-gambaran positif tentang perempuan tersebut perlu ditanamkan baik pada pola pikir laki-laki maupun perempuan itu sendiri sehingga tidak perlu terjadi adanya penguasa dan yang dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. *Sangkan Paran Gender*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amal, S. H. 1995. "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita" dalam T. O. Ihromi. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- As'ad, M. 1981. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- _____. 1987. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Asy'ari, Imam. 1983. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. Ed. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chilmi. 2006. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang*. Jombang: Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.
- Darma, A. B. 1998. *Persepsi Suami Terhadap Peran Isteri*. Jember: Universitas Jember. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).
- Effendi, T. N. 1987. *Konsep dan Ukuran Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: PPK UGM.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibran, Kahlil. 1986. *Sang Nabi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardono, Nurwitri. 1986. *Tenaga Kerja Wanita Suatu Prospek Positif bagi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Dharma Wanita.
- Heronymus. 1996. "Wanita Karier di Mata Pria". Dalam *Kedaulatan Rakyat*. Tanggal 18 April. Yogyakarta.

- Ihromi, T. O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jang, A. 1995. "Akses Wanita dalam Pembangunan Politik di Indonesia" dalam *Aspirasi FISIP*, 5 (1), hal. 22. Jember: Universitas Jember.
- Kartono, Karttini. 1992. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek*. Cetakan IV. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Katalog badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dan BAPPEDA Kabupaten Jombang, 2003. *Kabupaten Jombang dalam Angka*. Jombang: BPS.
- Manning, Chris. & Effendi, T. N. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informasi di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, S. C. U. 1985. *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia Suatu Tinjauan Psikologis*. Jakarta: UI Press.
- Munik'ah. 2005. "Peran Serta Suami dalam Menuntaskan Pekerjaan Domestik Isteri yang Bekerja di Sektor Publik" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (1/2005), hal. 20-30. Jember: Universitas Jember.
- Murniati, A. N. P. 2004a. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Magelang: Indonesia Tera.
- _____. 2004b. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga)*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nainggolan. 1985. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Pertja.
- Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ollenburger, J. C. & Moore, H. A. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2004. Tentang: *Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang*. Jombang: Bupati Jombang.

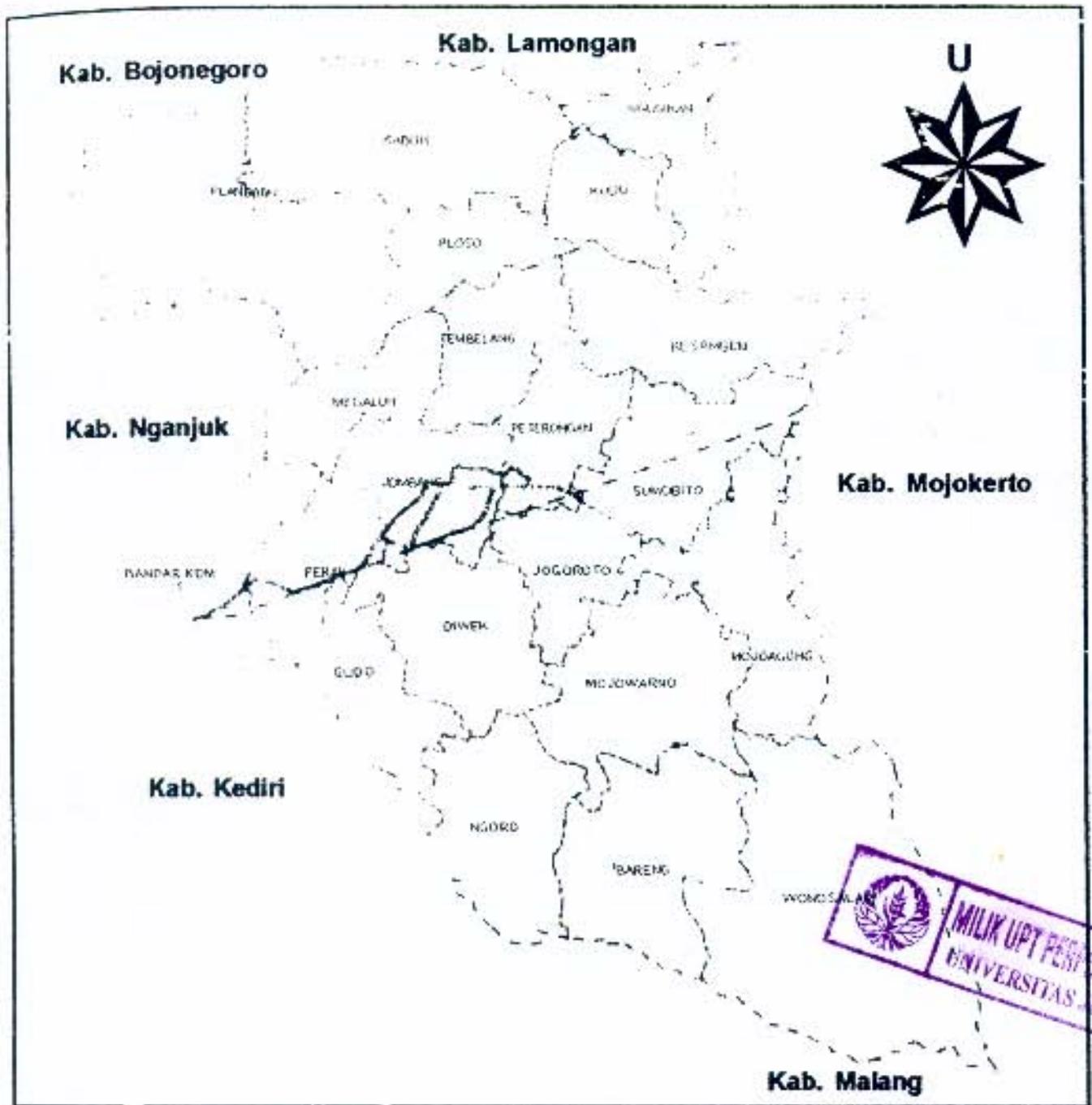
- Poerwodarminto, W. J. S. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Saptari, Ratna. & Holzner, Brigitte. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: PT Anem Kosong Anem.
- Sayogya, Pujiwati. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: PT Rajawali.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sockanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukri, S. S. 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sumardi, Mulyanto. & Hans, D. E. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sumarno, 2000. *Marginalisasi Pekerja Wanita pada Industri Sandang di Pedesaan*. Jember: Universitas Jember. (Laporan Penelitian yang tidak dipublikasikan).
- Suryochondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sutjiro. 2005. "Eksistensi Wanita dalam Rumah Tangga (Kajian Terhadap Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Jember)" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (1/2005), hal. 69. Jember: Universitas Jember.
- Suwondo, nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyanto, Bagong. & Hendrarso, E. S. 1996. *Wanita, dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- _____. 1996. *Kamus Besar Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- UPT Penerbitan. 2005. *Buku Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cetakan Pertama. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Hesti R., Ed. 1995. *Mewujudkan "Kemitrasejajaran Pri-Wanita" dalam Pembangunan Indonesia*. Malang: IKIP Malang.
- Wiludjeng *et al.* 2005. *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Wirutomo, Paulus. 1990. *Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Yuswadi, Hary. 1991. *Pembagian Kerja Secara Sexual dalam Keluarga Wanita yang Berperan Ganda*. Jember: Universitas Jember. (Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan).

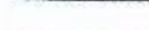
Majalah dan Koran:

- Bhirawa*. 2006. "Harus Pintar bagi Waktu", 22 (Maret, 2006).
- Femina*. 1990. "Wanita karier Mengejar Kemandirian atau Pergaulan", 25 (April 1990), hal. 36. Jakarta: PT Gaya Favorit Press.

PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Kolektor Primer
	Batas Kecamatan		Kolektor Sekunder
	Batas Desa		Lokal Primer
	Arteri Primer		Lokal Sekunder
	Arteri Sekunder		Jalan Kereta Api
			Sungai

Lampiran 2

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Informan Kunci

Nama	: Drs. Chilmi
Usia	: 50 tahun
Pendidikan terakhir	: S1
Masa kerja	: 30 tahun
Golongan/Jabatan	: IV/a/Kepala Bagian Umum
Jenis pekerjaan isteri	: Guru
Tingkat pendapatan isteri	: Di bawah suami

Beliau menuntut adanya keseimbangan peran isteri atau kaum perempuan bekerja dalam wilayah publik dan wilayah domestik. Menurutny laki-laki atau suami adalah pemegang kunci dalam semua bentuk kepemimpinan baik dalam keluarga maupun dalam lingkup publik. Meskipun beliau menyetujui masuknya perempuan ke dalam wilayah publik atau bekerja di luar rumah, beliau menghendaki kaum perempuan untuk tidak melupakan kodrat keperempuanannya. Dengan kata lain, wilayah domestik adalah tanggung jawab isteri atau perempuan dan walaupun laki-laki ikut mengerjakan pekerjaan domestik itu hanya bersifat membantu bukan suatu kewajiban sebagaimana halnya dengan seorang isteri atau perempuan.

Menurutnya dalam keseharian pekerjaan kantor, selaku sebagai kepala bagian beliau tidak membedakan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Jenis pekerjaannya tidaklah berdasarkan gender melainkan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam masing-masing bidang.

2. Responden

a. Nama	: Alfiah
Usia	: 53 tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA

Masa kerja : 25 tahun
Golongan/Jabatan : III/d/Kepala Sub Bagian Keuangan
Jenis pekerjaan suami : PNS
Tingkat pendapatan suami : Di atas isteri

Beliau tidak setuju dengan pernyataan bahwa perempuan selalu berada lebih rendah daripada laki-laki. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pendapatnya bahwa presiden dan menteri pun bisa dijabat oleh perempuan. Hal tersebut dicontohkannya pada Presiden Megawati dan Menteri Urusan Dan Peranan Wanita yaitu Meutia Hatta. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa kedudukan pemimpin tidak selalu dipegang oleh kaum laki-laki. Meskipun demikian, beliau masih berpegang pada ajaran agama bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Lebih lagi pada wilayah domestik atau privat, posisi laki-laki atau suami adalah seorang pemimpin atau sebagai kepala keluarga. Dengan kata lain, beliau menginginkan adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan pada wilayah publik bukan pada wilayah privat karena masih terhalang oleh adanya ajaran agama yang bisa dikatakan masih bersifat *nature*.

b. Nama : Dra. Indri Estiningati, MSi
Usia : 42 tahun
Pendidikan terakhir : S2
Masa kerja : 13 tahun
Golongan/Jabatan : III/d/Kepala Sub Bagian Umum
Jenis pekerjaan suami : PNS
Tingkat pendapatan suami : Di bawah isteri

Beliau sangat menganut adat dan ajaran agama yang cukup kuat sehingga adanya posisi kaum perempuan atau isteri lebih rendah daripada suami merupakan hal yang wajar. Adanya pembakuan posisi seperti demikian tidak membuat beliau khawatir akan posisinya sebagai perempuan, melainkan beliau sangat menerima. Namun lain halnya dengan posisi perempuan di wilayah publik,

beliau menekankan adanya kesetaraan dengan laki-laki karena menurutnya kedua jenis kelamin ini memiliki hak yang sama dan tidak perlu dibeda-bedakan menurut *gender typed* masing-masing. Mungkin yang harus dibedakan adalah potensi yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin. Banyak stereotip yang memojokkan kaum perempuan sehingga potensi kaum perempuan yang bisa lebih baik daripada kaum laki-laki dapat dikesampingkan dan kaum laki-laki diprioritaskan pada posisi utama, misalnya seperti itu.

c. Nama : Luluk Agustina Murti
Usia : 33 tahun
Pendidikan terakhir : S1
Masa kerja : 11 tahun
Golongan/Jabatan : III/a/Staf Bagian Keuangan
Jenis pekerjaan suami : PNS
Tingkat pendapatan suami : Di atas isteri

Masih seperti pendapat responden sebelumnya yaitu tonggak kepemimpinan keluarga berada di tangan suami. Namun dalam wilayah publik tidaklah demikian, beliau menghendaki adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian berbicara mengenai penyelesaian pekerjaan domestik, beliau memilih untuk mengerjakannya bersama-sama dengan suami serta anak-anak meskipun terkadang mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga (keluarga).

d. Nama : Mardiyah
Usia : 41 tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Masa kerja : 15 tahun
Golongan/Jabatan : II/d/Staf Bagian Keuangan
Jenis pekerjaan suami : PNS
Tingkat pendapatan suami : Di atas isteri

Sebagai seorang ibu dari tiga putra-putri, setiap pagi sebelum pergi bekerja beliau selalu mengurus atau menyelesaikan pekerjaan domestik sehingga terkadang merasa terbebani akan pekerjaan tersebut serta mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Menurutnya perempuan perlu mengadopsi sifat maskulin dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak dianggap lemah. Namun bukan berarti dengan mengadopsi sifat maskulin maka perempuan berubah menjadi kelaki-lakian atau bisa disebut sebagai tomboi. Sifat tersebut hanya dipergunakan sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Menurutnya kedudukan kaum perempuan dan kaum laki-laki seharusnya sama tetapi kaum perempuan tidak boleh melupakan kodratnya sebagai perempuan. Di dalam kantor pun beliau tidak merasa ada perbedaan peran dengan karyawan laki-laki karena peran tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

e. Nama	: Luluk Maimunah, SPd
Usia	: 34 tahun
Pendidikan terakhir	: S1
Masa kerja	: 8 tahun
Golongan/Jabatan	: III/b/Staf Bagian Umum
Jenis pekerjaan suami	: Swasta
Tingkat pendapatan suami	: Di atas isteri

Sebagai ibu rumah tangga dimana waktunya lebih banyak untuk pekerjaan publiknya, maka untuk menyelesaikan pekerjaannya domestik beliau mengerjakannya bersama sang suami. Beliau tidak merasa terbebani dengan pekerjaan domestik yang ada dan tidak merasa kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan publiknya karena memiliki seorang anak tidaklah merepotkan baginya. Peran suami menurutnya adalah sebagai kepala keluarga, akan tetapi pada era globalisasi ini perempuan dituntut untuk bisa mandiri dan mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak tergantung pada suami (laki-laki). Peran perempuan yang selalu sebagai bawahan ditanggapinya dengan biasa-biasa

saja karena menurutnya posisi tersebut sudah banyak ditempati oleh kaum perempuan. Mengenai adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, menurutnya tidaklah perlu ada karena emansipasi perempuan sangat diperlukan untuk kemajuan dan keharmonisan keluarga.

f. Nama : Titik Sugiarti
Usia : 36 tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Masa kerja : 15 tahun
Golongan/Jabatan : II/d/Staf Bagian Umum
Jenis pekerjaan suami : PNS
Tingkat pendapatan suami : Di atas isteri

Beliau sangat bersyukur menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja yang tidak merasakan terbebani dengan adanya peran ganda tersebut meskipun terkadang pula beliau merasakan kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan publik dengan keluarga. Untuk mengatasi kesulitan pembagian waktu tersebut, beliau membagi peran domestik dengan sang suami. Namun demikian pekerjaan domestik menurutnya tetap merupakan tanggung jawab seorang perempuan atau isteri. Kemudian peran antara laki-laki dan perempuan di kantor tidak dirasakan olehnya adanya suatu perbedaan karena menurutnya peran yang dijalankan telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

g. Nama : Tatik Sri Suhartiningsih
Usia : 54 tahun
Pendidikan terakhir : SLTP
Masa kerja : 23 tahun
Golongan/Jabatan : II/c/Staf Bagian Umum
Jenis pekerjaan suami : PNS
Tingkat pendapatan suami : Di atas isteri

Beliau berpendapat bahwa posisi suami adalah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga serta sebagai pelindung bagi isteri dan anak-anak. Sedangkan isteri sudah kodratnya berada di bawah laki-laki atau suami. Dengan kata lain, beliau menerima posisi perempuan yang selalu lebih rendah daripada laki-laki karena hal tersebut sudah peristiwa yang nature. Motivasi beliau bekerja adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau terkesan takut salah dalam memaparkan pendapatnya mengenai posisi perempuan yang selalu diposisikan sebagai orang nomor dua.

h. Nama	: Endang Retnowati, SH
Usia	: 43 tahun
Pendidikan terakhir	: S1
Masa kerja	: 13 tahun
Golongan/Jabatan	: III/d/Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
Jenis pekerjaan suami	: Swasta
Tingkat pendapatan suami	: Di bawah isteri

Menurutnya dalam rumah tangga antara suami dan isteri harus saling pengertian dan saling terbuka serta saling mengisi di kala ada kekurangan di salah satu pihak. Begitu pula dalam pembagian kerja domestik yaitu saling membantu antara suami, isteri dan anak-anak. Bantuan dalam pengerjaan pekerjaan tersebut disesuaikan dengan perlu tidaknya pekerjaan tersebut memerlukan bantuan. Apabila pekerjaan domestik dirasa bisa diselesaikan sendiri maka tidak perlu bantuan orang lain. Dengan demikian perempuan masih menyandang predikat sebagai "nyonya rumah" yang bertanggung jawab atas pekerjaan kerumahtanggaan. Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki tidak perlu ada selama masing-masing jenis kelamin mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Berhubungan dengan hal itu, peran laki-laki maupun perempuan dalam wilayah publik harus disesuaikan dengan porsi kemampuannya masing-masing. Menurutnya pula, dengan masuknya perempuan ke dalam wilayah publik secara

langsung memang dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di mata laki-laki supaya laki-laki lebih menghormati dan tidak semena-mena terhadap perempuan. Selain itu, perempuan yang bekerja di lingkup publik secara tidak langsung menjadikan perempuan lebih leluasa dan mandiri (tidak hanya menggantungkan pada suami).

- i. Nama : Wiwin Istiqomah Budiningrum
- Usia : 36 tahun
- Pendidikan terakhir : D3
- Masa kerja : 13 tahun
- Golongan/Jabatan : II/d/Staf Bagian Rapat dan Risalah
- Jenis pekerjaan suami : PNS
- Tingkat pendapatan suami : Di atas isteri

Menurutnya perbedaan peran antara suami dan isteri tidaklah perlu ada karena selama keduanya sama-sama bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jabatan yang dipegangnya menurutnya adalah disesuaikan dengan golongan, keahlian serta promosi dalam dunia kerja, jadi bukan berdasarkan gender. Alasan beliau bekerja adalah untuk membantu meringankan kebutuhan rumah tangga dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan. Dengan masuknya perempuan ke dalam dunia kerja secara otomatis akan meningkatkan harkat dan martabat perempuan karena menurutnya disamping sebagai ibu rumah tangga perempuan juga tahu tentang dunia kerja yang beraneka ragam sehingga dapat menambah pengetahuan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 339385 Fax. (0331) 337818 Jember 68121
E-mail : lemlit_unej @ jember.telkom.net.id

Nomor : 048 /J25.3.1/PL.5/2006 17 Januari 2006
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

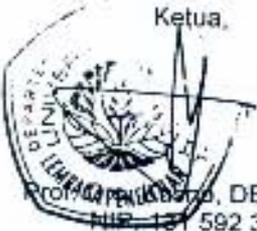
Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Jombang
di -
JOMBANG

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 0152/J25.1.2/PI.5/2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : RATNA MUFIDAH / 02 - 2074
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Jawa IVC / 8 Jember (0331) 339228
Judul Penelitian : Posisi Perempuan Bekerja Serta Dampaknya Terhadap Diskriminasi Gender (Studi Deskriptif Posisi Perempuan yang Bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang)
Lokasi : Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan Bapak memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Bapak disampaikan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. H. H. H. H., DEA., Ph.D.
NIS. 131 592 357

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JALAN KH. WAHID HASYIM 137 TELEPON 861560
JOMBANG - 61411

SURAT IJIN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 072/ 27 /1415.42/2005

TENTANG
IJIN PENELITIAN PENYUSUNAN SKRIPSI
BUPATI JOMBANG

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. Keputusan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Bappeda Kabupaten Jombang;
 - c. Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tertanggal 17 Januari 2005 Nomor 0152/J25.1.2/Pl.5/2005 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : RATNA MUFIDAH
Nim/Nirm : 02 - 2074
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Politik/Ilmu Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : Penelitian
Judul : *Posisi Perempuan Bekerja Serta Dampaknya Terhadap Diskriminasi Gender (Studi Deskriptif Posisi Perempuan Yang Bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang)
Waktu : 2 Bulan (Januari – Februari 2006)
Lokasi : Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

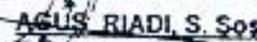


Ketentuan yang harus dilaksanakan:

- a. Tidak menyimpang dari tujuan Penelitian ;
- b. Tidak memberi beban atau gangguan tugas instansi di lokasi penelitian dengan alasan apapun.
- c. Segera melapor ke BAPPEDA Kabupaten Jombang, jika penelitian dimaksud telah selesai dengan menyampaikan hasilnya

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 27 Januari 2006

An. BUPATI JOMBANG
BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

AGUS RIADI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 045

Tembusan:

- 1. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Jombang;
- 2. Yth. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Jombang;
- 3. Yth. Sdr. Ketua LEMLIT Universitas Jember;
- 4. Yang Bersangkutan